

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT PENGELUARAN
2020-2024



VOLUME
12
2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT PENGELUARAN

2020-2024

VOLUME
12
2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT PENGELUARAN 2020–2024

Volume 12, 2025

Nomor Katalog: 9302020.33

ISSN: 2655-075X

Nomor Publikasi: 33000.25016

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv + 83 halaman

Naskah: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Penyunting: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Pembuat Kover: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Penerbit: ©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Sumber Ilustrasi: Freepik.com, Canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT PENGELUARAN 2020–2024
Volume 12, 2025**

Pengarah:

Endang Tri Wahyuningsih

Penanggung Jawab:

Didik Nursetyohadi

Penyunting:

Eny Pramudyastuti

Pengolah Data dan Penulis Naskah:

Irma Nur Afifah

Tabel/Grafik:

Irma Nur Afifah

Penata Letak:

Irma Nur Afifah

Desain Kover:

Joko Mulyono

Desain Infografis:

Joko Mulyono

KATA PENGANTAR

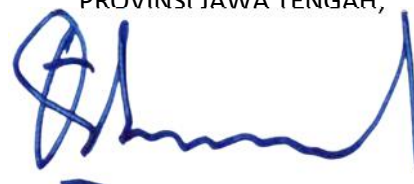
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu diantara indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Data PDRB juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor impor dan lain sebagainya.

Dalam publikasi ini ditampilkan PDRB Jawa Tengah yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Melalui pendekatan ini, PDRB dirinci menurut komponen pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPR), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori dan Ekspor Impor. Disamping menampilkan angka PDRB Jawa Tengah menurut Pengeluaran, publikasi ini juga mengulas tentang kondisi ekonomi global dan nasional terutama yang terkait dengan PDRB Pengeluaran.

Publikasi ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak untuk kepentingan pengembangan ekonomi Jawa Tengah khususnya, baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat.

Semarang, April 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH,



Endang Tri Wahyuningsih

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT PENGELUARAN 2020-2024

Volume 12, 2025

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 1. PENDAHULUAN	 3
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	3
1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB	4
 2. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	 9
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)	9
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NONPROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)	12
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)	14
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	16
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)	20
2.6 EKSPOR – IMPOR	24
 3. PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA DAN INDONESIA	 29
3.1 PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA	29
3.2 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA	33
 4. PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TENGAH	 41
4.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB JAWA TENGAH MENURUT PENGELUARAN	42
4.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	44

4.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT	47
4.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	49
4.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	51
4.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI	53
4.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI	54
4.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI	56
4.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH	57
5. PENUTUP	63
LAMPIRAN	65
DAFTAR PUSTAKA	83

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Mitra Dagang Indonesia (persen), 2020–2024 ..	30
Tabel 4.1	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, 2020–2024	44
Tabel 4.2	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga ADHB Menurut Kelompok Konsumsi (persen), 2020–2024	46
Tabel 4.3	Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga ADHK 2010 Menurut Kelompok Konsumsi (persen), 2020–2024	47
Tabel 4.4	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT, 2020–2024	48
Tabel 4.5	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, 2020–2024	50
Tabel 4.6	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, 2020–2024	51
Tabel 4.7	Perkembangan dan Struktur PMTB, 2020–2024	53
Tabel 4.8	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori, 2020–2024	54
Tabel 4.9	Perkembangan dan Struktur Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri, 2020–2024.....	55
Tabel 4.10	Perkembangan dan Struktur Impor Barang dan Jasa Luar Negeri, 2020–2024	57
Tabel 4.11	Net Ekspor Antar Daerah, 2020–2024	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (persen), 2020–2024	31
Grafik 3.2	PDB Per Kapita Indonesia (juta rupiah), 2020–2024	34
Grafik 3.3	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Global, Nasional dan Jawa Tengah (persen), 2020–2024	35
Grafik 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Komponen Utama (persen), 2020–2024.....	36
Grafik 3.5	Kontribusi Menurut Komponen PDB Pengeluaran (persen), 2020–2024	37
Grafik 4.1	Perubahan Struktur Komponen PDRB Jawa Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2020–2024	43
Grafik 4.2	Rata-rata Pertumbuhan Komponen PDRB Pengeluaran (persen), 2020–2024.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara di Dunia (persen), 2020–2024 <i>World Economic Outlook, October 2024 Update</i>	67
Lampiran 2	Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran (miliar rupiah) 2020–2024.....	68
Lampiran 3	Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran (miliar rupiah), 2020–2024.....	69
Lampiran 4	Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia ADH Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran (persen), 2020–2024	70
Lampiran 5	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia ADHK 2010 Menurut Komponen Pengeluaran (persen), 2020–2024.....	71
Lampiran 6	Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2020–2024.....	72
Lampiran 7	Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2020–2024	73
Lampiran 8	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (persen), 2020–2024.....	74
Lampiran 9	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (persen), 2020–2024	75
Lampiran 10	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) Jawa Tengah menurut Pengeluaran 2020–2024	76
Lampiran 11	Laju Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah menurut Pengeluaran (persen), 2020–2024.....	77
Lampiran 12	Andil Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah menurut Pengeluaran (persen), 2020–2024	78
Lampiran 13	Nilai Ekspor Nonmigas Jawa Tengah Menurut Golongan Barang (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen) 2023–2024.....	79
Lampiran 14	Nilai Ekspor Migas Jawa Tengah (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen), 2023–2024.....	80
Lampiran 15	Nilai Ekspor Jawa Tengah Menurut Sektor (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen), 2023–2024.....	81

Lampiran 16	Nilai Impor Nonmigas Jawa Tengah Menurut Golongan Barang (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen), 2023–2024.....	82
Lampiran 17	Nilai Impor Migas Jawa Tengah (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen), 2023–2024.....	83
Lampiran 18	Nilai Impor Jawa Tengah Menurut Golongan Penggunaan Barang (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen), 2023–2024.....	84

<https://jateng.bps.go.id>

PDRB ADHB MENURUT PENGELUARAN

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2020–2024** (MILIAR RUPIAH)



2020

1.347.222,49

2021

1.419.735,15

2022

1.559.140,36

2023*

1.695.621,56

2024**

1.817.776,96

Catatan: * : angka sementara
** : angka sangat sementara



1

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu diantara indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau regional dalam periode waktu tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan secara nominal nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan secara riil nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan. Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. PENDEKATAN PRODUKSI

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. PENDEKATAN PENDAPATAN

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. PENDEKATAN PENGELUARAN,

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Pendapatan regional merupakan indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari angka ini antara lain:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah/*region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/*daerah/region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/*daerah/region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/*luar wilayah*.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://jateng.bps.go.id>

PDRB ADHK MENURUT PENGELUARAN

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020–2024**
(MILIAR RUPIAH)



2020

965.227,26

2021

997.321,13

2022

1.050.278,09

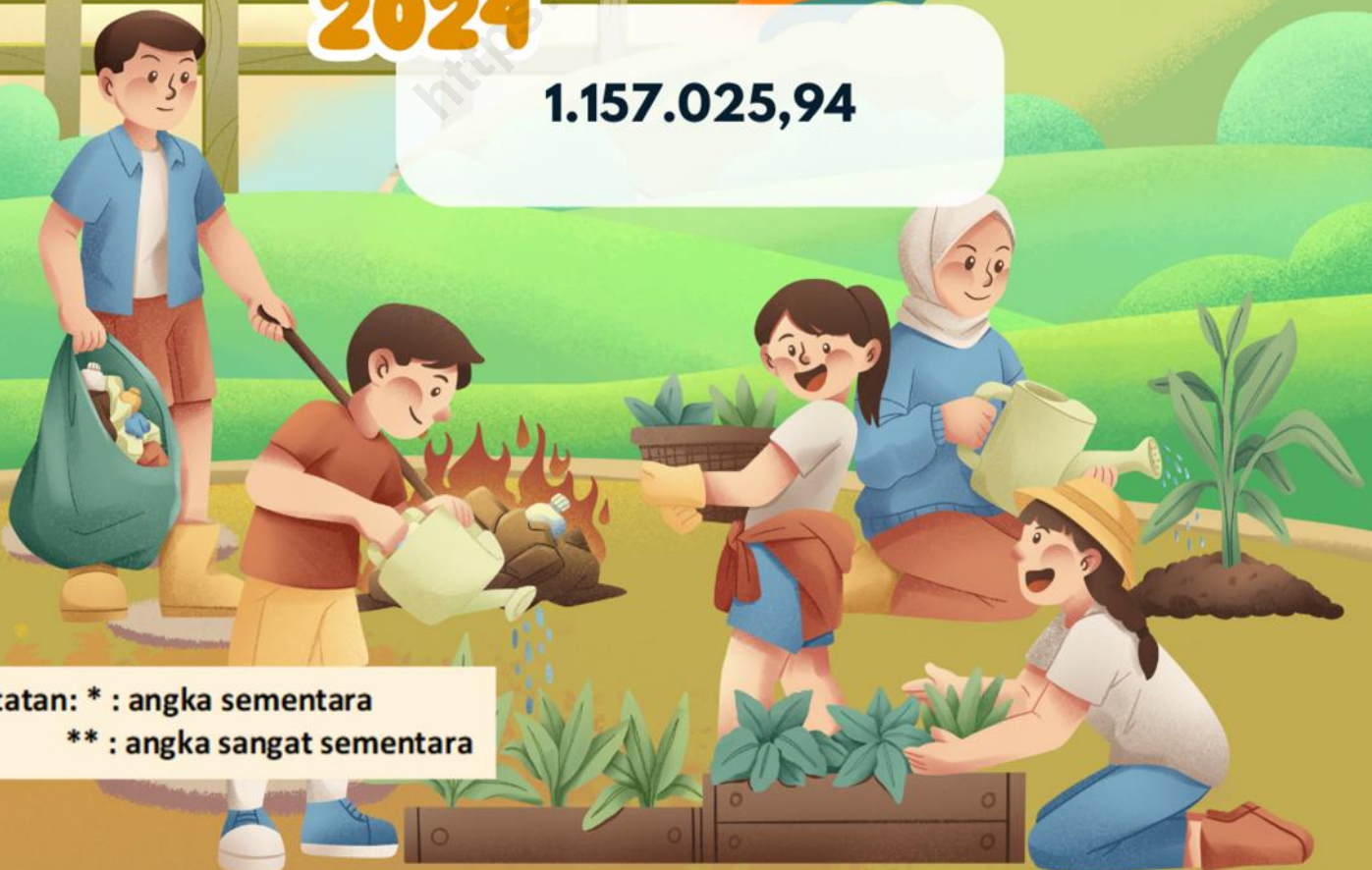
2023*

1.102.473,57

2024**

1.157.025,94

Catatan: * : angka sementara
** : angka sangat sementara



2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

1. KONSEP, DEFINISI DAN CAKUPAN

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan

10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena ketersediaan data yang ada, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) klasifikasi COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

) Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

) Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;

) Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;

) Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

) Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)

) Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

) Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

-) Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. METODE PENGHITUNGAN

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

-) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
-) Jumlah penduduk pertengahan tahun,
-) Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
-) Indeks Harga Konsumen (IHK).
-) Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT ADH Berlaku. PKRT ADH Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADH Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah disesuaikan;
5. Menyusun Indeks Harga Implisit berdasarkan IHK Provinsi dan 7 kelompok COICOP;

6. PKRT ADH konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NONPROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

1. KONSEP, DEFINISI DAN CAKUPAN

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga nonprofit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

-) LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
-) pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
-) setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
-) kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
-) istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi

sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. METODE PENGHITUNGAN

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah:

-) Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
-) Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
-) Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Nonprofit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{\sum x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

b. Mengestimasi PKLNPRRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij}}{N_i}$$

X : PKLNPRRT ADH Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRRT ADH Berlaku. PKLNPRRT ADH Konstan 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKLNPRRT ADH Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

1. KONSEP, DEFINISI DAN CAKUPAN

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; dan PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

2. METODE PENGHITUNGAN

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

-) Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
-) Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
-) Statistik Keuangan Daerah (BPS)
-) Output Bank Indonesia (BI)
-) Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi ADH Berlaku

Secara umum, PK-P ADH Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

Metode Estimasi dan Sumber Data

PK-P adh Berlaku =
Output non pasar—penjualan barang dan jasa + Output Bank Indonesia

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk tingkat Provinsi, PK-P Provinsi ADH Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi ADH Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADH Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. KONSEP, DEFINISI DAN CAKUPAN

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah **bruto** mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu .

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

2. METODE PENGHITUNGAN

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah:

-) Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi.
-) Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
-) Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga.
-) Laporan keuangan perusahaan.

-) Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
-) IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
-) Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
-) Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
-) Publikasi Statistik Konstruksi.
-) Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
-) Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas.

Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

PENDEKATAN LANGSUNG

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (ADH) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADH berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADH Konstan, maka PMTB ADH Berlaku tersebut di *deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

PENDEKATAN TIDAK LANGSUNG

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADH Berlaku maupun ADH Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADH Berlaku. Untuk memperoleh nilai ADH Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (ADH Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikan PMTB ADH Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADH Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADH Berlaku, nilai PMTB ADH Konstan tersebut di *reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADH Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB ADH Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). **Kedua**, untuk memperoleh PMTB ADH Konstan adalah dengan cara mendeflate PMTB ADH Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADH Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADH Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada sebelumnya. Sedangkan PMTB ADH

Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADH Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADH Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADH Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu :

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

1. KONSEP, DEFINISI DAN CAKUPAN

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada waktu tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir akuntansi dengan nilai inventori pada awal akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan

- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2. METODE PENGHITUNGAN

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

-) Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
-) Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
-) Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
-) Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
-) Data komoditas perkebunan;
-) Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
-) Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
-) Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

PENDEKATAN LANGSUNG

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADH Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

-) menghitung posisi inventori ADH Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
-) menghitung perubahan inventori ADH Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan

-) menghitung perubahan inventori ADH Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADH Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

PENDEKATAN TIDAK LANGSUNG

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADH Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADH Konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori ADH Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

-) Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk waktu yang berurutan;
-) Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
-) Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
-) Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR IMPOR

1. KONSEP, DEFINISI DAN CAKUPAN

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 -) Ekspor antar daerah
 -) Impor antar daerah

2. METODE PENGHITUNGAN

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah:

-) Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
-) Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
-) Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
-) Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
-) Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;

-) Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
-) Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang.

Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://jateng.bps.go.id>

PERTUMBUHAN EKONOMI

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020–2024**
(PERSEN)

2020

-2,65

2021

3,33

2022

5,31

2023

4,97

2024

4,95



3

PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA DAN EKONOMI INDONESIA

3.1 PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA

International Monetary Fund (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 pada angka 3,20 persen. Negara-negara *advanced economies* diperkirakan tumbuh sebesar 1,70 persen, sedangkan *emerging market* dan *developing economies* tumbuh 4,20 persen (*WEO Report, Update January 2025*). Pertumbuhan ekonomi dunia yang sebesar 3,20 persen didasarkan pada asumsi ketidakpastian prospek ekonomi global yang masih tinggi.

Prosesi demokrasi yang berlangsung pada hampir 50 persen populasi dunia dan menghasilkan pemerintahan baru, berdampak signifikan pada kebijakan perdagangan dan fiskal, sebagaimana laporan WEO IMF. Kebijakan moneter yang diterapkan belum dapat meredam inflasi di beberapa negara dan masih berlanjut. Kondisi geopolitik yang tak kunjung kondusif, seperti invasi Federasi Rusia ke Ukraina dan konflik yang terjadi di Timur Tengah, dianggap dapat membebani transaksi kinerja perdagangan dan investasi, hal ini berpotensi menimbulkan kerawanan rantai pasok *supply* dan *demand* yang berdampak pula pada pelemahan potensi ekonomi. Itulah mengapa di tahun 2024 ekonomi global menunjukkan pertumbuhan yang relative stabil namun lambat dengan kinerja ekonomi bervariasi antar negara dan kawasan.

Meski demikian didukung fundamental ekonomi yang kuat, aktivitas ekonomi di *emerging market* termasuk ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Stabilitas ekonomi stabil di *emerging market* dan *developing economies* di kisaran angka 4,20 persen menunjukkan kinerja perekonomian kuat dan terus berlanjut.

Pasca ekonomi dunia mengalami kontraksi pada tahun 2020 hingga -4,30 persen, tahun 2021–2023 ekonomi global mulai bangkit. Aktivitas ekonomi mulai menggeliat dan tercatat tumbuh sebesar 6,20 persen di tahun 2021, dan melambat di tahun berikutnya yaitu tahun 2022 dan 2023 masing-masing tumbuh sebesar 3,50 persen dan 3,10 persen, dan diestimasi stabil sebesar 3,20 persen di tahun 2024 (sumber: *WEO*). Tensi politik masih tinggi, perang Ukraina–Rusia berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan berbagai negara mitra dagang Indonesia, yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, selengkapnya disajikan pada Grafik 3.1.

Sementara ekonomi Indonesia masih tetap solid menunjukkan angka pertumbuhan pada level moderat, dan tumbuh impresif yaitu sebesar 5,30 persen di tahun 2022, tertinggi dibanding Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok dan Korea Selatan, dan tahun 2023 mencatat ketangguhan ekonomi Nasional hingga tumbuh mencapai 5,00 persen. Kinerja perekonomian ini bahkan telah kembali ke level sebelum pandemi, yang tumbuh pada kisaran 5–6 persen.

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Mitra Dagang Indonesia (persen), 2020–2024

No	Negara	2020	2021	2022	2023	2024 ^e
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Amerika Serikat	-2,21	5,80	1,94	2,90	2,80
2	Uni Eropa	-6,07	5,93	3,40	0,60	1,00
3	Jepang	-4,15	2,56	0,96	1,50	-0,20
4	Tiongkok	2,24	8,45	2,99	5,24	4,80
5	India	-5,78	9,70	6,99	8,20	6,50
6	Indonesia	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03
	Dunia	-2,70	6,48	3,46	3,30	3,20

Catatan: ^e Angka Estimasi

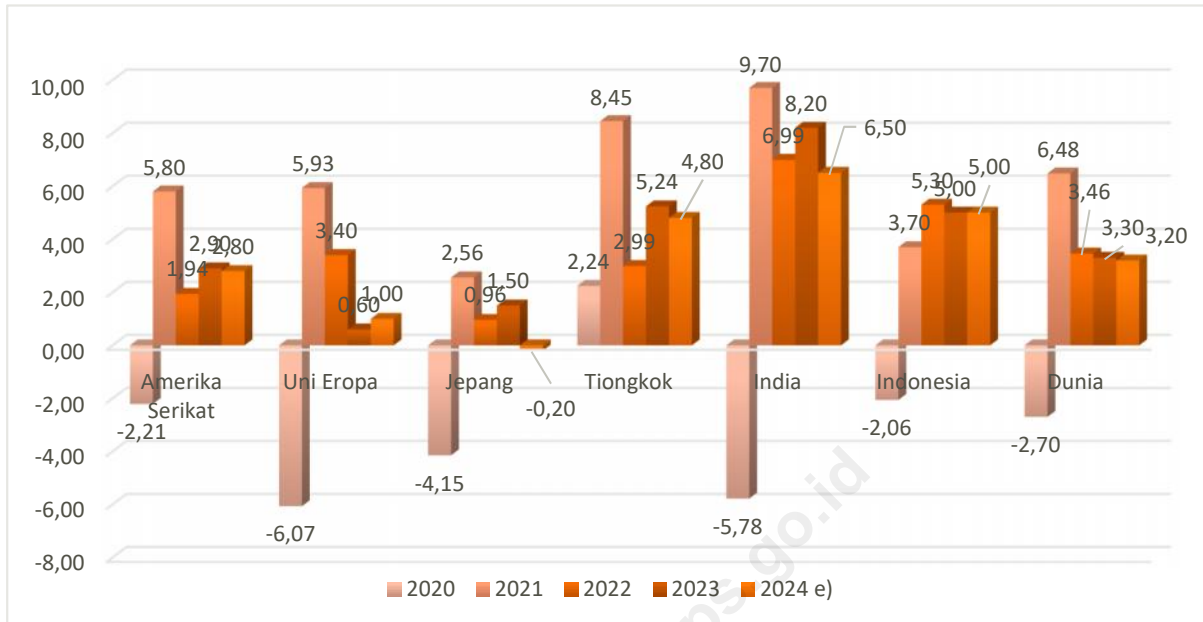
Sumber: *World Economy Outlook, January 2025*

Pemulihan ekonomi global pada tahun 2021–2024 sebagian besar didorong oleh transaksi perdagangan yang meningkat dan penyerapan investasi. Demikian halnya ekonomi Indonesia tumbuh stabil di angka 5 persen selama 3 tahun terakhir. Dari sisi *demand*, seluruh komponen pengeluaran tumbuh menguat terutama sub komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023, tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, meneguhkan pemulihan kinerja ekonomi yang lebih baik.

Kondisi geopolitik seperti perang Rusia vs Ukraina dan konflik yang terjadi di Timur Tengah nampaknya turut berdampak bagi perekonomian global, sebagaimana diberitakan *German Institute of Economics*. Berdasarkan Kajian Tengah Tahun *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)*, perang Rusia vs Ukraina disinyalir berpengaruh sangat besar terhadap pemangkasan pertumbuhan ekonomi global. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global, dari semula 4,10 persen menjadi sebesar 2,90 persen. Meski demikian menurut laporan *World Economy Outlook* (WEO) tercatat pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,40 persen lebih tinggi dari estimasi awal, dengan realisasi di tahun 2022 mencapai 3,50 persen. Indef menilai bahwa invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan adanya pembatasan akses gas, minyak, dan komoditas, sehingga imbasnya

terjadi kenaikan harga energi, komoditas, hingga pangan. Kondisi itu tidak hanya mengganggu perekonomian di wilayah Eropa Timur, tetapi juga terhadap dunia secara keseluruhan. Hal ini terlihat adanya perlambatan ekonomi di beberapa Negara. Dan di tahun 2024, prediksi pertumbuhan ekonomi global tertahan di angka stagnan, yaitu 3,00 persen



Sumber : *World Economy Outlook, January 2025*

Grafik 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Global (persen), 2020–2024

Di tengah disrupti lingkungan global sepanjang 2023 dan berlanjut di tahun 2024, baik dari sisi rantai pasok, bencana alam akibat perubahan iklim yang ekstrem, volatilitas sektor keuangan, serta fragmentasi geo-ekonomi, perekonomian Indonesia relatif tangguh. Sepanjang 2024, aktivitas bisnis global berada di zona ekspansi. Ekonomi global dan mitra dagang utama tetap tumbuh. Amerika Serikat (AS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80 persen pada tahun 2021 dan melambat di tahun 2022 hingga tercatat sebesar 1,94 persen dan tumbuh sebesar 2,9 persen di tahun 2023, dan stabil di 2024 sebesar 2,80 persen. Angka 5,80 persen di tahun 2021 merupakan angka pertumbuhan tertinggi sejak 1984 dengan pertumbuhan 7,20 persen pada masa Presiden Ronald Reagan. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aktivitas konsumen, ekspor, dan pengeluaran investasi sektor swasta. Namun meski melambat menjadi 2,90 persen pada tahun 2023 dan stabil sebesar 2,80 persen, angka ini dinilai masih tetap solid. Hal ini ditopang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 68 persen dari PDB. Disisi lain inflasi bergerak lebih rendah dari estimasi awal. Demikian pula dari sisi investasi swasta menyumbang 16 persen dari PDB dan investasi Pemerintah sebesar 18 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia, situasi pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa juga mulai tumbuh mencapai 5,93 persen di tahun 2021 dan 3,40 persen di tahun 2022, namun melambat di tahun 2023 yang tumbuh bahkan tidak mencapai 1,00 persen. Pemulihan ekonomi Uni Eropa didukung oleh adanya dana pemulihan ekonomi Uni Eropa. Negara-negara uni Eropa yaitu Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol di tahun 2021 ekonomi pulih dan berlanjut di tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 3,50 persen, namun berbeda halnya di tahun 2023 yang melambat hingga hanya mampu tumbuh sebesar 0,60 persen, namun di tahun 2024, kembali meningkat hingga tumbuh mencapai 1 persen.

Jerman sebagai salah satu kekuatan ekonomi Uni Eropa tumbuh 2,70 persen sepanjang tahun 2021 dan di tahun 2022 tumbuh melambat sebesar 1,8 persen dan bahkan di 2023 kontraksi sebesar -0,30 persen dan di 2024 pun kontraksi sebesar -0.20 persen. Jerman sebagai negara di Eropa yang tertinggal dalam pemulihan dari goncangan ekonomi akibat pandemi. Kinerja ekonomi belum mencapai tingkat sebelum krisis, demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Federal Georh Thiel yang dirilis AFP. Seperti diketahui tingkat inflasi zona Eropa sempat mencapai rekor tertinggi hingga 10,60 persen pada Oktober 2022, karena lonjakan harga energi dan makanan yang disebabkan invasi Rusia ke Ukraina. Kondisi suram menghantui ekonomi Jerman, yang mengalami stagnasi pada dua kuartal, konsumsi rumah tangga bahkan menunjukkan pertumbuhan nol persen dan ekspor turun karena rendahnya permintaan luar negeri.

Beralih ke Tiongkok, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 atau di masa pandemi nyatanya tumbuh positif 2,24 persen disaat hampir semua negara di dunia tumbuh negatif. Kota Wuhan, Tiongkok yang diyakini merupakan tempat awal penyebaran Covid-19 telah kembali normal. Saat pandemi melanda, Wuhan mengalami *lockdown*, menyusul kota lainnya di China. Ekonomi Tiongkok menjadi yang pertama berkontraksi akibat pandemi. Namun Tiongkok pulih dengan cepat. Kasus Covid-19 di Tiongkok terkendali sejak April (Woldometers, 2020). Ekonomi Tiongkok juga menjadi yang pertama kali pulih. Pertumbuhan ekonomi negara ini hanya berkontraksi pada kuartal pertama sebesar -6,8 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi pertama kalinya di Tiongkok sejak Revolusi Kultural pada 1976. Tiongkok adalah negara yang tidak mengalami resesi, karena pada kuartal kedua ekonomi sudah bangkit dan mampu tumbuh 3,2 persen dan berturut-turut tumbuh 4,9 persen dan 6,5 persen pada kuartal empat. Permintaan masker medis dan berbagai peralatan kesehatan dari seluruh pasar internasional terhadap Tiongkok meningkat pesat.

Meskipun pertumbuhan ekonomi secara tahunan mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,95 persen, namun Tiongkok adalah negara besar yang mampu menahan gejolak ekonomi dunia tidak negatif lebih dalam. Pemulihan ekonomi tersebut didukung

oleh keberhasilan pengendalian penyebaran Covid-19 serta pemberian stimulus fiskal dan moneter untuk meningkatkan investasi. Tahun 2021 Tiongkok mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,45 persen sepanjang tahun 2021 dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Tahun 2022 tercatat meski melambat namun tetap optimis dengan pertumbuhan sebesar 3,00 persen. Dan tahun 2023 nyatanya Tiongkok tumbuh impresif sebesar 5,24 persen dan stabil di 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,20 persen.

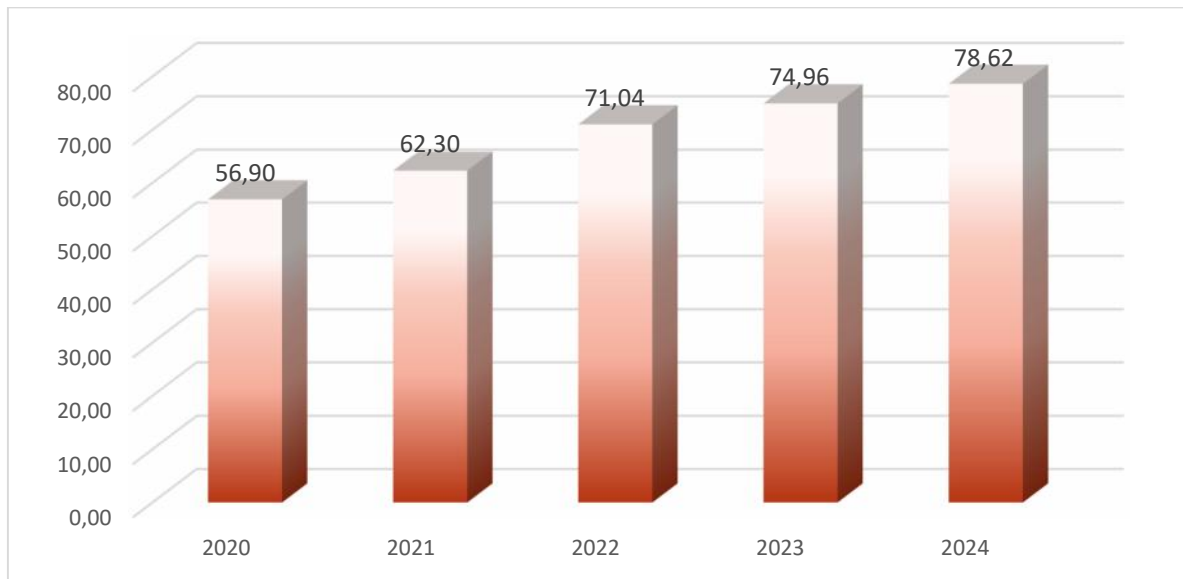
Ekonomi Tiongkok melanjutkan pemulihan yang stabil dan memimpin dunia dalam pembangunan ekonomi dan pengendalian epidemi (NBS). Angka perdagangan Tiongkok menunjukkan ekspor dan impor naik. Aktivitas manufaktur bangkit. Ekspor Tiongkok mendapatkan pangsa pasar besar-besaran ketika banyak negara menerapkan *lockdown* (Biro Statistik Nasional Tiongkok, 2020). Tiongkok melonggarkan tindakan penguncian relatif lebih awal dari negara lain. Meski sempat mengalami *lockdown* yang kesekian kali, namun kini Tiongkok telah membuka kembali aktivitas ekonomi dan mampu memicu inflasi global yang lebih terkendali. Pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia disajikan pada Tabel Lampiran 1.

3.2 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

PDB PERKAPITA PENDUDUK INDONESIA

Pendapatan per kapita merupakan ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk.

PDB tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 5,03 persen, meski tidak lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,05 persen, namun lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,7 persen. Dari sisi demand komponen konsumsi Lembaga nonprofit mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,48 persen. Hal ini tentu didorong dengan konsumsi partai politik pada even pemilihan umum di Februari 2024. Dengan pertumbuhan ekonomi ini juga tingkat PDB per kapita penduduk Indonesia berhasil naik dari 62,3 juta rupiah di tahun 2021 menjadi 71,0 juta rupiah di tahun 2022 atau tumbuh 13,96 persen dan sebesar 75 juta rupiah di tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 5,63 persen dibanding 2022, selanjutnya di tahun 2024 sebesar 78,62 juta rupiah, tumbuh 4,87 persen. Dengan pencapaian ini dan klasifikasi Bank Dunia terakhir (2020), Indonesia masuk ke kelompok *Upper-Middle Income Countries* pada tahun 2023 bersama 52 negara lainnya di dunia, yaitu negara dengan pendapatan menengah ke atas (indonesia.go.id).



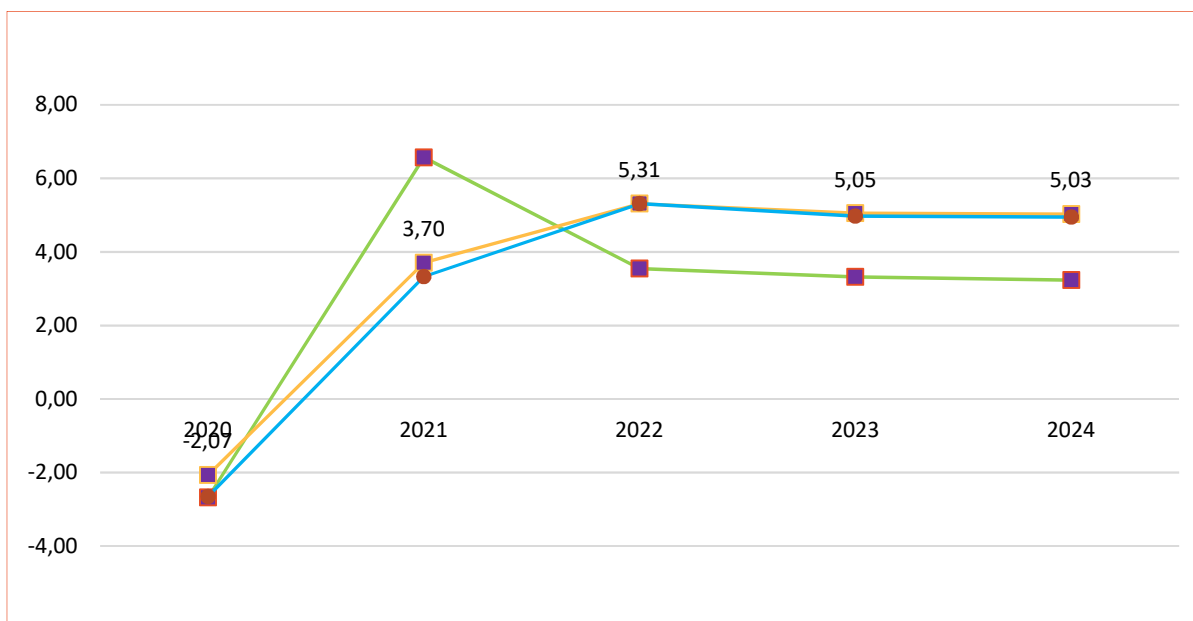
Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2024

Grafik 3.2 PDB Per Kapita Indonesia (juta rupiah), 2020–2024

LAJU PERTUMBUHAN PDB

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi PDB tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding 2023 yang tumbuh sebesar 5,05 persen, tidak lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen, namun lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang mencapai 3,70 persen. Pertumbuhan sebesar 5,03 persen di tahun 2024 ini ditopang oleh pertumbuhan positif di semua komponen utama PDB pengeluaran.

Ekonomi Global, nasional dan Jawa Tengah menunjukkan pergerakan yang optimis. Grafik 3.3 menunjukkan ekspansi ekonomi yang mampu tumbuh bahkan di level moderat sebesar 5 persen untuk Nasional, Jawa Tengah tumbuh 4,95 persen dan dlobal tumbuh 3,20 persen, proyeksi ekonomi global ini lebih tinggi jika dibandingkan proyeksi sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya indikasi peningkatan aktivitas ekonomi di negara-negara maju, seperti China, Amerika Serikat dan lainnya.



Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2024

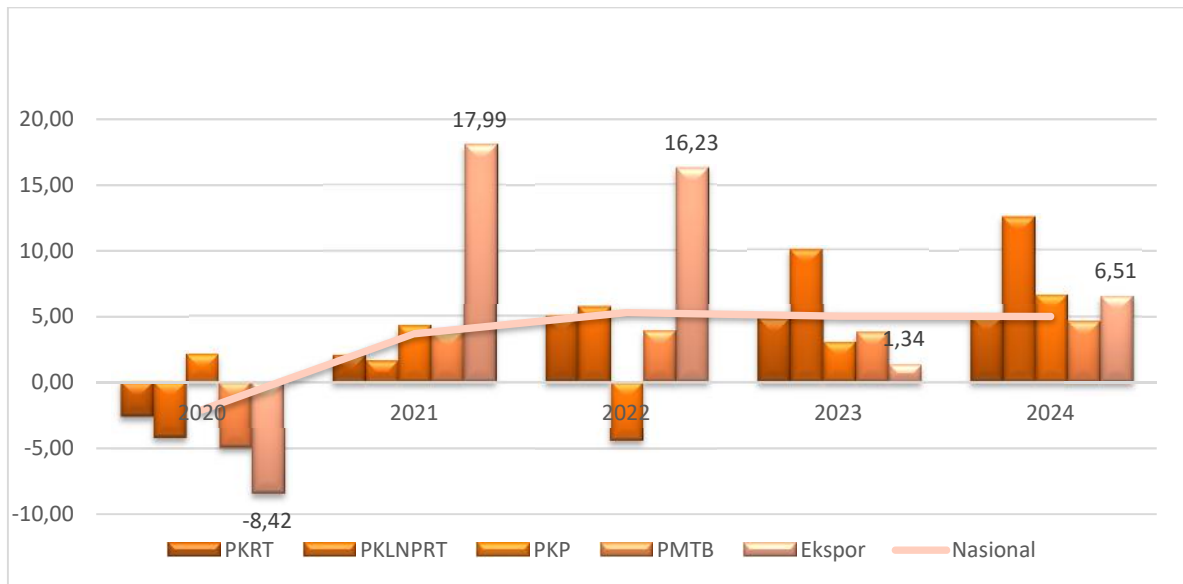
Grafik 3.3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Global, Nasional dan Jawa Tengah (persen), 2020–2024

STRUKTUR EKONOMI MENURUT KOMPONEN PENGELUARAN

Struktur kontribusi ekonomi nasional menurut pengeluaran didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PKRT) yang mencapai 54,04 persen di tahun 2024. Kontributor berikutnya adalah PMTB yang mencatat nilai investasi sebesar 29,15 persen. Aktivitas ekspor barang dan jasa memberikan kontribusi yang tinggi yaitu sebesar 22,18 persen. Hal ini mencerminkan menguatnya pemulihan permintaan domestik, khususnya sektor produksi. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor unggulan nasional seperti manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan transportasi melanjutkan tren pemulihan dengan mencatat pertumbuhan kuat.

Tiga komponen pembentuk PDB Pengeluaran yang besar adalah PKRT, PKP dan PMTB. Tahun 2024, PKRT tumbuh sebesar 4,94 persen, PMTB tumbuh sebesar 4,61 persen, dan PKP tumbuh sebesar 6,61 persen menjadi penopang laju pertumbuhan ekonomi nasional. Tak dapat dipungkiri percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia, mampu menyokong investasi bangunan seperti jalan, normalisasi sungai dan irigasi, maupun pembangunan Gedung sepanjang 2023–2024.

Aktivitas Lembaga nonprofit yang di tahun 2023 masih persiapan pemilu dan memberikan catatan pertumbuhan sebesar 9,83 persen, di tahun 2024 bertepatan dengan perhelatan pemilu dan pilkada memberikan pertumbuhan sebesar 12,48 persen.

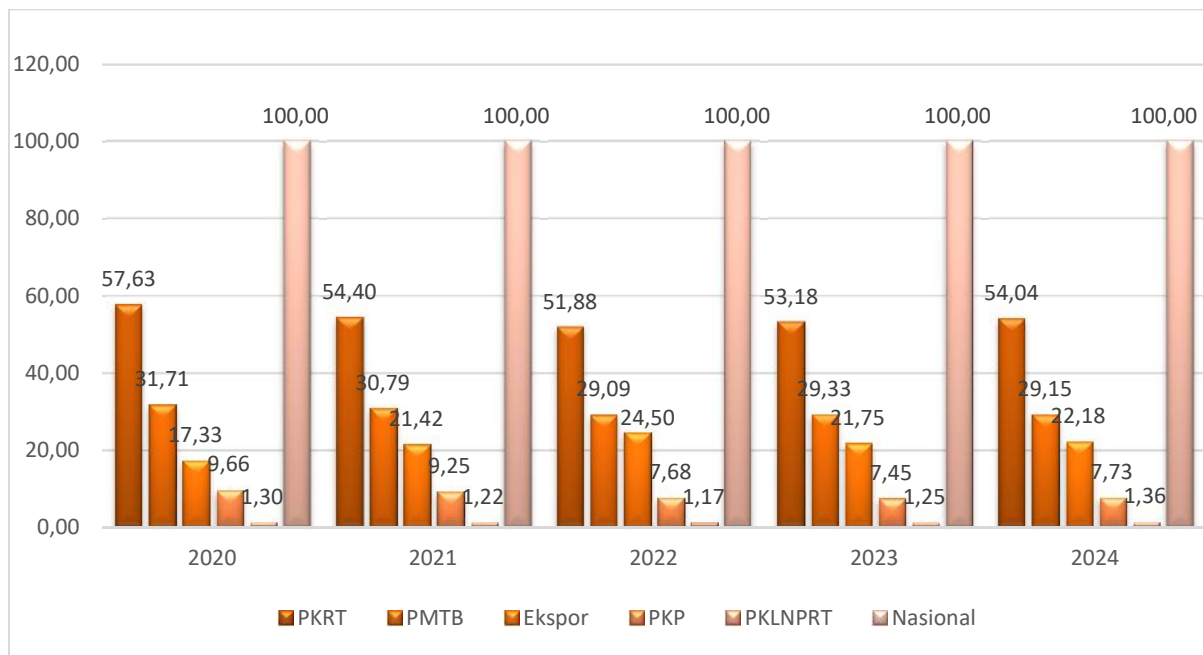


Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2024

Grafik 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Menurut Komponen Utama (persen), 2020–2024

Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan menjadi endemi melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2023 membawa angin segar bagi tumbuh kembangnya ekonomi di Indonesia. Keppres Nomor 17 Tahun 2023 secara bertahap telah ditetapkan Pemerintah, melalui penerapan kebijakan pelonggaran PPKM yang tertuang dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri secara bertahap di awal tahun 2022. Tanggal 30 Desember 2022, PPKM resmi dicabut, sebagaimana instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022, yang didasari dengan tingkat imunitas masyarakat yang semakin tinggi (kementerian kesehatan). Meski demikian masyarakat tetap diminta untuk berhati-hati dalam menjaga kesehatan di lingkungan masyarakat. Terlebih dengan adanya elnino yaitu perubahan iklim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi. Tak bisa dipungkiri bahwa sepanjang tahun 2024, aktivitas masyarakat dan ekonomi telah kembali normal sepenuhnya dan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat utamanya di semua sub komponen PKRT tercatat meningkat selama tahun 2023 yang sebesar 4,82 persen dan di tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 4,94 persen.

Kinerja Ekspor mencatatkan share tinggi sebesar 21,75 persen sepanjang tahun 2023 dan meningkat di tahun 2024 sebesar 22,18 persen. Kontribusi ekonomi menurut komponen pengeluaran selengkapnya disajikan pada Grafik 3.5.



Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2024

Grafik 3.5 Kontribusi Menurut Komponen PDB Pengeluaran (persen), 2020–2024

LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024** (PERSEN)



PENGELUARAN
KONSUMSI
RUMAH TANGGA

5,15

PENGELUARAN
KONSUMSI
LNPRT

16,38

PENGELUARAN
KONSUMSI
PEMERINTAH

3,01

LAJU PERTUMBUHAN PDRB
4,95

PEMBENTUKAN
MODAL TETAP
BRUTO

6,55

EKSPOR LUAR
NEGERI

11,09

IMPOR LUAR
NEGERI

9,29

4

PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TENGAH

Perekonomian global menunjukkan pertumbuhan relative stagnan, sebesar 3,2 persen dengan tantangan ketegangan geopolitik yang tak kunjung usai, meskipun terindikasi moderasi. Pandemi memang telah berlalu, namun muncul berbagai spekulasi dimana kondisi ekonomi banyak dipengaruhi berbagai dinamika global yang telah di prediksi sebelumnya. Seperti perubahan iklim yang mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca yang cenderung ekstrem. Pergeseran ini terjadi secara alamiah, yang dipengaruhi variasi siklus matahari. Selain itu dampak konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi dan dampak limbah industri yang tidak *sustainable* mendorong percepatan perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini (BMKG). Konsekuensi akibat dari kondisi ini adalah kekeringan yang panjang, naiknya permukaan laut, banjir, badai dan penurunan keanekaragaman hayati (indonesia.un.org). Hal ini berpengaruh terhadap kondisi ekonomi utamanya kinerja kategori pertanian.

Perang Rusia vs Ukraina yang tak kunjung usai juga berdampak pada perekonomian global, dan bahkan telah memangkas pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yaitu meningkatnya inflasi di seantero Eropa, sebagaimana diungkap oleh *Swiss National Bank*. Semenjak Rusia menginvasi Ukraina di awal tahun 2022, Eropa mengalami lonjakan harga energi dan pasar keuangan yang bergejolak, akibat minimnya pasokan energi dan krisis produktivitas yang melambat di uni Eropa pasca minimnya *demand* dari luar negeri. Hal ini berdampak pada kontraksi yang cukup tajam pada perekonomian Rusia dan Ukraina.

Berbeda dengan kondisi perekonomian global, kondisi ekonomi Nasional dan Jawa Tengah, kembali bangkit dan tumbuh cukup tangguh ditengah isu global yang terus menghantui perekonomian dunia. Perbaikan dan pemulihan ekonomi ini didorong oleh implementasi vaksinasi dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), rekonsiliasi berbagai pihak di bidang ekonomi serta tingkat kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas dengan rasa aman, karena kondisi yang relatif normal dan ekspansi perdagangan mulai giat kembali. Meski di 2024 ekonomi Indonesia melambat yaitu dari 5,05 persen di tahun 2023, menjadi sebesar 5,03 persen di tahun 2024, namun dapat dikatakan bahwa kondisi ini tangguh, dengan pertumbuhan di level moderat 5 persen.

Demikian pula Jawa Tengah, meskipun melambat dari 4,97 persen di tahun 2023, menjadi sebesar 4,95 persen di tahun 2024, namun dapat dikatakan bahwa ekonomi Jawa Tengah pun cukup

kuat dan solid. Selengkapnya ulasan ekonomi Jawa Tengah ditinjau dari sisi konsumsi akan dibahas pada ulasan berikut ini.

4.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB JAWA TENGAH MENURUT PENGELUARAN

Besaran nilai ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 secara nominal mencapai 1.817,78 triliun rupiah, meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar 1.695,62 triliun rupiah, dan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nilai ekonomi Jawa Tengah ditinjau dari sisi konsumsi, sebagian besar digerakkan oleh semua komponen yang tumbuh positif, meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumahtangga, konsumsi pemerintah, PMTB, dan net ekspor yang melampaui nilai ekonomi melebihi prapandemi atau kondisi ekonomi pada tahun 2020–2022.

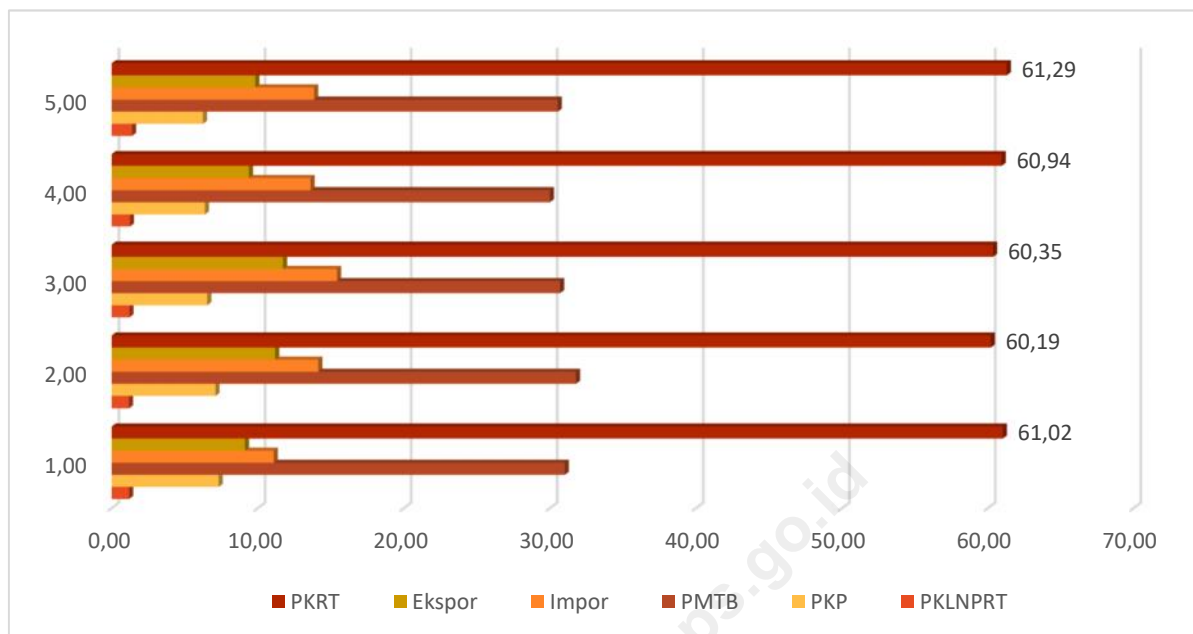
Secara struktur ekonomi, peranan konsumsi rumah tangga memegang peranan yang paling besar. Kontribusinya mencapai lebih dari 61,29 persen dalam membentuk ekonomi Jawa Tengah tahun 2024. Selain konsumsi rumah tangga, PMTB atau investasi juga menunjukkan peranan yang besar dengan kontribusi sebesar lebih dari 30 persen. Demikian pula dengan aktivitas kinerja ekspor luar negeri yang berkontribusi sebesar 9,83 persen. Hal ini memberi gambaran bahwa pasar ekonomi Jawa Tengah semakin luas dan tidak hanya sekedar pasar domestik Jawa Tengah, namun merambah hingga ke mancanegara. Peningkatan pasar ini ditopang oleh investasi (PMTB) bangunan dan non bangunan sebagai komponen penting bagi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa.

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan perekonomian terbesar ke-4 di Indonesia. Perekonomian Jawa Tengah berada di bawah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kinerja ekonomi Jawa Tengah selama ini ditopang oleh tiga komponen besar yaitu konsumsi rumah tangga, investasi (PMTB) dan kinerja ekspor. Investasi (PMTB) dan Kinerja ekspor mengalami peningkatan setelah tertahan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Meskipun demikian, dari sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi secara total, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) yang memberikan kontribusi dengan memberikan pertumbuhan sebesar 5,15 persen di tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,68 persen, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,52 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 1,82 persen.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumahtangga (PKLNPR) juga menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan di tahun 2024, yang tercatat tumbuh sebesar 16,38 persen. Capaian ini lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 7,34 persen, jauh lebih

tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5 persen, pasca mengalami kontraksi sebesar 1,25 di tahun 2021. Signifikansi pertumbuhan PKLNPR ini tak terlepas dari even perhelatan pemilihan umum nasional yang digelar pada 14 Februari 2024 dan pilihan kepala daerah serentak pada November 2024, dimana konsumsi partai politik utamanya meningkat signifikan.



Catatan : Ekspor dan impor meliputi ekspor/impor antar provinsi dan antar negara.

Grafik 4.1 Perubahan Struktur Komponen PDRB Jawa Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu sebesar 3,01 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang sebesar 2,64 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang tumbuh sebesar 0,12 persen, dan sebesar 0,46 persen di tahun 2021.

Komponen PMTB atau investasi Jawa Tengah tahun 2024 tumbuh sebesar 6,55 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2023 memberikan andil pertumbuhan sebesar 4,36 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh tinggi sebesar 1,99 persen. Tingginya nilai investasi dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi pertanda bahwa ekonomi Jawa Tengah mulai bangkit pasca pandemi Covid-19 dan terus pulih seiring normalisasi aktivitas ekonomi.

Komponen Ekspor memberikan pertumbuhan sebesar 10,74 persen, jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2022 tumbuh sebesar 0,73 persen. Sementara itu nilai impor di tahun 2024 mencapai 12,00 persen, sedangkan di 2023 tumbuh sebesar 0,46 persen. Demikian pula di tahun 2022, pertumbuhan impor yang merupakan faktor pengurang untuk net ekspor tercatat tumbuh sebesar 8,22 persen.

4.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga merupakan komponen yang memiliki proporsi terbesar dalam PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran. Konsumsi ini dipenuhi dari produk domestik dan produk impor, baik impor dari luar negeri maupun dari wilayah provinsi lain. Dalam kurun waktu 2017–2021, nilai konsumsi rumah tangga mengalami penurunan akibat pandemi dan meningkat di tahun 2022 pasca pandemi dengan PC-PEN, dan di tahun 2023, dimana pandemi telah beralih menjadi endemi, berdampak pada kondisi normal aktivitas ekonomi Jawa Tengah termasuk konsumsi rumahtangga.

Share ekspor dan impor Jawa Tengah diatas 30 persen, menyebabkan ekonomi Jawa Tengah sangat tergantung dari perdagangan tersebut. Bahan baku dan barang modal beberapa industri di Jawa Tengah tergantung dari peran ekspor dan impor. Pemulihan ekonomi 2021 dan 2022 mengembalikan perdagangan Jawa Tengah mendekati normal seperti pada masa sebelum pandemi. Dan di tahun 2024, capaian kinerja ekspor melampaui target ditengah lesunya perekonomian dunia. Hal ini didasarkan pada trafik ekspor sepanjang tahun 2024, yang disebabkan beberapa faktor, antara lain adanya pelatihan ekspor (*coaching programme*), pelatihan prosedur ekspor, hingga pameran (ekspo) di dalam dan luar negeri. Jawa Tengah selain mengeksport ke Tiongkok, Amerika dan Australia, juga merambah pasar nontradisional seperti di Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Amerika Tengah (jatengprov.go.id). Sejumlah industri kembali menggeliat dengan berbagai permintaan dari dalam dan luar negeri. Bahan baku dan barang modal mulai meningkat, sehingga mendorong peningkatan impor Jawa Tengah tahun 2022–2024. Sinyal positif dari fenomena konsumsi rumah tangga yang tertahan pada masa pandemi kembali pulih, terlihat dari aktivitas belanja masyarakat baik *online* maupun *offline*.

Tabel 4.1 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, 2020–2024

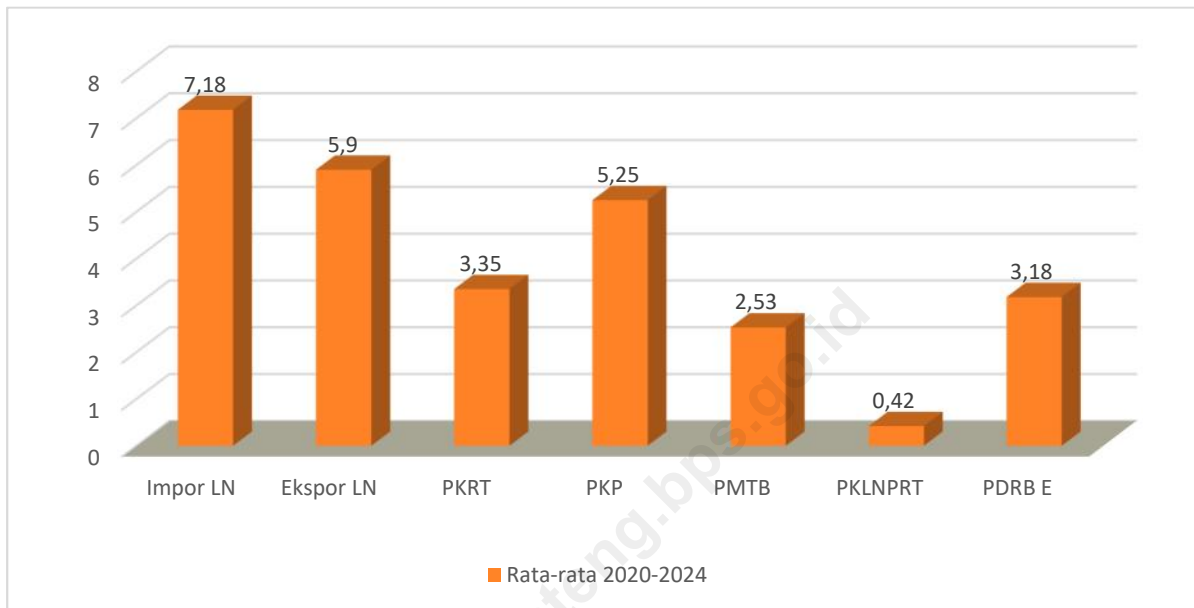
Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	822.095,50	854.472,69	940.909,55	1.033.375,35	1.114.046,54
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	573.976,75	584.447,30	616.679,57	651.723,52	685.307,23
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	60,99	60,14	60,35	60,94	61,29
Pertumbuhan ADHK (%)	-1,42	1,82	5,52	5,68	5,15

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB ADHB selama tahun 2020 hingga 2024 cenderung stabil di kisaran lebih dari 60 persen. Hal ini mencerminkan pengeluaran konsumsi rumahtangga memberikan andil yang mendominasi bagi PDRB dari sisi *demand*.

Secara umum, konsumsi akhir rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh Jawa Tengah juga meningkat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan untuk membiayai konsumsi makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki, perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga, kesehatan dan pendidikan, transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya, hotel dan restoran, serta lainnya semakin meningkat. Secara nilai semua jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga di atas meningkat, dengan pertumbuhan yang bervariasi pada sub komponennya.



Sumber: BPS Jawa Tengah (data diolah)

Grafik 4.2 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Komponen PDRB Pengeluaran (persen), 2020–2024

STRUKTUR POLA KONSUMSI RUMAHTANGGA

Di era sekarang, rumah tangga kelas menengah menjadi bagian yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya dari sisi jumlah yang terus meningkat akan tetapi perubahan gaya hidup mendorong konsumsi rumah tangga kelompok masyarakat ini mengalami peningkatan. Didukung lagi dengan melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik, sehingga memicu meningkatnya konsumsi. Selain itu, konsumsi tersebut juga didorong oleh populasi kaum muda yang terus bertambah hingga meningkatkan penggunaan belanja *online*. Meski isu menurunnya daya kalangan menengah, namun dari sisi konsumsi rumahtangga tetap solid di kisaran angka pertumbuhan 5 persen.

Tabel 4.2 memperlihatkan struktur pola konsumsi masyarakat. Konsumsi makanan dan minuman masih merupakan kebutuhan konsumsi terbesar, di tahun 2024 sebesar 41,81 persen dan

peranannya semakin meningkat dari keseluruhan konsumsi rumah tangga karena penurunan konsumsi *leisure* seperti transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya, hotel dan restoran. Perubahan pola konsumsi masyarakat ini tidak lepas dari pengaruh pandemi yang membatasi pergerakan manusia. Bahkan pada bulan Maret–Mei 2020 diberlakukan PSBB, nyaris tidak ada aktivitas transportasi, dan penutupan berbagai tempat wisata dan hiburan untuk menekan penyebaran virus Covid19. Kemudian 2021, kebijakan menjadi PPKM Mikro dengan berbagai level sesuai dengan tingkat penularan Covid19 yang di wilayah tersebut. Kebijakan ini cukup membawa dampak positif, karena masyarakat sudah mulai berani beraktivitas di luar rumah. Adanya program vaksinasi juga menambah tingkat kepercayaan masyarakat untuk kembali bekerja secara normal. Dan beralihnya situasi pandemi menjadi endemi di tahun 2023 dan 2024 semakin menguatkan kondisi ekonomi Jawa Tengah yang tangguh dalam pola konsumsi rumahtangga.

Tabel 4.2 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga ADHB Menurut Kelompok Konsumsi (persen), 2020–2024

Kelompok Konsumsi	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	39,62	40,57	40,89	41,26	41,81
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,12	4,03	3,87	3,69	3,57
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,85	12,64	11,97	11,72	11,39
d. Kesehatan dan Pendidikan	8,26	8,21	7,72	7,26	7,06
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	24,81	24,17	25,36	25,95	26,12
f. Hotel dan Restoran	8,23	8,28	8,14	8,10	8,09
g. Lainnya	2,13	2,11	2,06	2,01	1,96
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PERTUMBUHAN POLA KONSUMSI RUMAHTANGGA

Pertumbuhan konsumsi (riil) rumah tangga ADHK juga dapat menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan kuantitas konsumsi rumah tangga. Informasi ini menggambarkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat terutama pada golongan menengah ke atas (Tabel 4.3). Pada tahun 2021, kelompok konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 1,82 persen. Pertumbuhan paling tinggi pada sub kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya dari tahun 2021–2023 pasca pandemi. Pada saat pandemi, konsumsi *leisure* ini yang paling terdampak, namun ketika pemulihan ekonomi, konsumsi rumah tangga menengah ke atas mulai bangkit kembali

dengan pengeluaran *leisure*-nya yang ditunjukkan dari pengeluaran semua sub komponen pengeluaran rumahtangga yang tumbuh positif. Tak dapat dipungkiri di tahun 2024 meski PKRT tumbuh 5,15 persen, kondisi ini melemah dibanding 2023 yang tumbuh sebesar 5,68 persen, sebagai dampak menurunnya jumlah kalangan menengah, namun hal ini mesti dikaji lebih lanjut.

Tabel 4.3 Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga ADHK 2010 Menurut Kelompok Konsumsi (persen), 2020–2024

Kelompok Konsumsi	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	1,31	1,84	5,30	4,90	4,43
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,03	0,23	2,67	2,98	2,95
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,55	0,79	1,25	6,16	4,05
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,53	0,19	2,19	1,49	2,89
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	-5,89	3,57	9,90	8,06	7,55
f. Hotel dan Restoran	-6,73	0,68	4,07	6,30	5,50
g. Lainnya	0,17	0,17	2,76	3,44	1,68
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	-1,42	1,82	5,52	5,68	5,15

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NONPROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PKLNPR)

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu sekitar 1,00 persen. Peranan institusi ini dalam perekonomian masih perlu mendapat perhatian sehingga ke depannya akan semakin meningkat. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPR adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Berdasarkan tabel 4.4, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) pada tahun 2024 sebesar 16,38 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 7,34 persen, dan meningkat dibanding tahun 2022 yang tumbuh 5,00 persen, jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -3,72 persen. Aktivitas lembaga keagamaan diawali tahun 2021 yang mulai mengadakan kegiatan sholat berjamaah dan tarawih di masjid dan berlanjut pada tahun 2022 aktivitas mulai pulih dan kondusif untuk aktivitas keagamaan

lainnya. Perayaan agama sudah dilakukan di tempat-tempat ibadah mapupun di lapangan atau tempat terbuka.

Hal inilah yang mendukung pertumbuhan positif pada konsumsi LNPRT. Selain itu, organisasi kebudayaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi juga mulai menggeliat dan beraktivitas kembali dengan massiv, seperti contoh peringatan hari lahir organisasi masa tertentu yang dilaksanakan dengan mengerahkan anggota dengan jumlah yang besar untuk turut berpartisipasi pada even tersebut.

Tahun 2023 yang bertepatan dengan momen persiapan pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden dan anggota legislatif, menambah pertumbuhan cukup signifikan bagi aktivitas partai politik. Pengeluaran partai politik mulai pengadaan atribut seperti spanduk, bendera, *Metromedia Technologies* atau MMT gambar calon wakil rakyat yang digunakan untuk kampanye, serta biaya yang cukup tinggi adalah kampanye di media televisi dan media sosial lainnya, menambah konsumsi LNPRT tumbuh signifikan. Dan di tahun 2024, perhelatan pemilu digelar dalam 2 periode, yaitu pilihan presiden dan wakil presiden pada Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah digelar pada November 2024. Sehingga even tersebut berdampak pada pertumbuhan LNPRT yang signifikan, utamanya pada aktivitas partai politik dan lembaga sosial masyarakat lainnya.

Tabel 4.4 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Pengeluaran Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	16.064,61	16.784,70	18.990,24	21.140,37	25.220,29
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	10.198,08	10.326,06	10.842,65	11.638,89	13.545,00
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	1,19	1,18	1,22	1,25	1,39
Pertumbuhan ADHK (%)	-3,72	1,25	5,00	7,34	16,38

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP) terdiri dari konsumsi individu dan konsumsi kolektif. Secara nominal, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan perbaikan yaitu atas dasar berlaku, maupun secara riil atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2024. Tahun 2020 nilai Konsumsi Pengeluaran Pemerintah (PKP) sebesar 98,68 triliun rupiah, kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 101,90 triliun rupiah dan terus meningkat mencapai 102,03 triliun rupiah pada 2022. Kemudian, pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 108,17 triliun rupiah. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 113,53 triliun rupiah.

Belanja pemerintah terjadi peningkatan karena peningkatan anggaran program pemulihan ekonomi di tahun-tahun pasca pandemi. Belanja pemerintah menjadi sebuah instrumen yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam mendukung perekonomian. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga semakin meningkat yang pada akhirnya mendorong ekonomi untuk terus tumbuh.

Proporsi pengeluaran konsumsi akhir pemerintah dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah tidak lebih dari 10 persen. Sebagian pengeluaran pemerintah dalam bentuk barang modal tercatat dalam komponen PMTB dan sebagian lagi yang dikeluarkan dalam bentuk dana bantuan sosial kepada individu atau masyarakat akan tercatat dalam komponen PKRT. Jika digabungkan, maka peran pemerintah sebenarnya lebih dari 10 persen.

Meskipun peranan konsumsi akhir pemerintah tidak terlalu besar, kebijakan pemerintah yang bersifat positif seperti penyediaan infrastruktur, kemudahan dan keterbukaan iklim berusaha, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan lain-lain akan memberikan dampak berantai yang positif terhadap perkembangan perekonomian secara umum.

PERTUMBUHAN KONSUMSI PEMERINTAH

Pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah secara riil berfluktuasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi pemerintah terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar -4,14 persen. Rendahnya konsumsi pemerintah terjadi akibat *shortfall* pajak yang melebar dan mempengaruhi realisasi belanja pemerintah. Pasca pandemi, konsumsi pemerintah menunjukkan pertumbuhan yang positif, dan di tahun 2024, PKP mampu tumbuh mencapai 3,01 persen.

Pertumbuhan konsumsi individu 2020–2024 berfluktuasi, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 3,02 persen dan terendah tahun 2020 yaitu -3,56 persen. Demikian juga

dengan pertumbuhan konsumsi kolektif, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 4,97 persen, sedangkan pertumbuhan terendah -4,71 persen terjadi pada tahun 2020. Konsumsi akhir pemerintah merupakan pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial dari pemerintah.

Tabel 4.5 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	98.678,84	100.820,61	101.881,73	108.395,76	113.530,27
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	60.998,74	61.280,82	61.351,97	62.971,77	64.870,03
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	7,32	7,10	6,54	6,38	6,25
Pertumbuhan (% ADHK)	-4,14	0,55	0,12	2,64	3,01

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

STRUKTUR KONSUMSI PEMERINTAH

Secara struktur, pengeluaran konsumsi pemerintah dibedakan menjadi **konsumsi kolektif** dan **konsumsi individu**. Konsumsi kolektif menggambarkan konsumsi pemerintah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat seperti keamanan, perekonomian, kebijakan dan kehidupan beragama. Sedangkan konsumsi individu menggambarkan konsumsi pemerintah yang dinikmati oleh masyarakat tertentu seperti pendidikan dan kesehatan. Hanya penduduk yang bersekolah dan yang mengakses fasilitas kesehatan pemerintah yang menikmatinya. Data pada Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa proporsi antara kedua jenis konsumsi ini di Jawa Tengah hampir berimbang. Secara nominal, kedua pengeluaran ini mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali menguat pada tahun 2021, walaupun belum sama seperti sebelum pandemi. Namun di tahun 2023 sudah lebih baik dengan pertumbuhan sebesar 2,85 persen, dengan konsumsi kolektif tumbuh sebesar 2,48 persen dan konsumsi individu sebesar 3,23 persen. Di tahun 2024, konsumsi kolektif tumbuh signifikan sebesar 4,97 persen dan konsumsi individu tumbuh 1,08 persen.

Tabel 4.6. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir Pemerintah ADHB					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)	49.878,84	50.245,31	52.417,99	55.733,54	59.689,57
Persentase	50,55	49,84	51,34	51,52	52,58
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)	48.800,00	50.575,30	49.613,73	52.435,22	53.840,70
Persentase	49,45	50,16	48,66	48,48	47,42
Total Konsumsi (Miliar Rp)	98.678,84	100.905,61	101.999,76	108.168,76	113.530,27
Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (Persentase ADHK 2010)					
a. Konsumsi Kolektif	-4,71	-1,38	2,64	2,26	4,97
b. Konsumsi Individu	-3,56	2,28	-2,01	3,02	1,08
Total Konsumsi	-4,14	0,55	0,12	2,64	3,01
Pertumbuhan indeks implisit (Persen)					
a. Konsumsi Kolektif	-0,08	2,15	1,71	3,98	2,02
b. Konsumsi Individu	-0,44	1,32	0,10	2,59	1,58
Total Konsumsi	-0,26	1,70	0,97	3,29	1,89

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan yang direalisasikan menjadi investasi dalam bentuk fisik. Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Investasi fisik berfungsi sebagai input tidak langsung di dalam proses produksi pada berbagai sektor lapangan usaha dan dapat digunakan secara berulang. Investasi fisik ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor dan dibedakan dalam dua jenis yaitu bangunan dan non bangunan.

PERTUMBUHAN PMTB

Pertumbuhan PMTB berfluktuasi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 6,84 persen dan terendah tahun 2020 sebesar -6,98 persen, kemudian melambat pada tahun 2022 sebesar 1,99 persen, kembali meningkat di tahun 2023 sebesar 4,36 persen, dan terus meningkat di tahun 2024 sebesar 6,55 persen. PMTB dalam bentuk bangunan memberikan proporsi lebih besar dibanding non-bangunan dalam PMTB. Rata-rata perbandingan antara kedua komponen ini adalah sekitar 85 persen untuk PMTB bangunan dan 15 persen untuk non-bangunan. Perubahan yang terjadi

pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB.

PERTUMBUHAN PMTB BANGUNAN

Pertumbuhan PMTB bangunan cenderung lebih stabil dibandingkan non bangunan setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan PMTB tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, seperti infrastruktur jalan, jembatan, sarana perhubungan, energi dan sebagainya. Peningkatan infrastruktur dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta dapat meningkatkan daya saing di tengah persaingan global. Khusus di tahun 2020 untuk investasi bangunan terjadi kontraksi sebesar -5,83 persen, disebabkan oleh dampak pandemi yang berpengaruh terhadap nilai investasi. Namun investasi bangunan di Jawa Tengah tahun 2021 menunjukkan geliatnya kembali dengan tumbuh sebesar 7,08 persen dan di tahun 2022 meski melambat tumbuh sebesar 1,57 persen dan meningkat kembali di tahun 2023 mencapai 4,64 persen, demikian pula di tahun 2024 tumbuh sebesar 7,21 persen.

PERTUMBUHAN PMTB NON-BANGUNAN

Pertumbuhan PMTB non-bangunan cenderung berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,84 persen dan terendah pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -13,53 persen. Pembangunan beberapa PLTU di Jawa Tengah yang dimulai tahun 2017, mencapai puncak pemenuhan kebutuhan mesin-mesin di tahun 2018. Hal ini yang memicu pertumbuhan PMTB non bangunan tahun 2018 meningkat cukup tinggi. Tahun 2019 pembangunan PLTU sudah sampai pada tahap *finishing*, dan kebutuhan mesin-mesin PLTU sudah berkurang, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan di tahun 2019. Sebagian besar mesin-mesin PLTU tersebut diimpor dari luar negeri. Tahun 2020 terjadi kontraksi karena sejumlah usaha terimbas pandemi. Meski demikian terjadi pemulihan ekonomi sehingga PMTB non bangunan kembali tumbuh sebesar 5,34 persen pada tahun 2021. Kemudian mengalami perlambatan di tahun 2022 dan 2023 masing-masing tumbuh sebesar 4,64 persen dan 1,68 persen, kembali menguat di 2024 yang tumbuh sebesar 2,43 persen.

Pemerintah Jawa Tengah terus berupaya untuk meningkatkan investasi baik investasi dari luar negeri atau penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) melalui berbagai kebijakan, antara lain kemudahan dalam hal perizinan, promosi potensi Jawa Tengah dan menyediakan wilayah khusus kawasan industri baru di beberapa kabupaten/kota, seperti di Kabupaten Kendal yang disebut dengan Kawasan Ekonomi Kendal (KEK) dan kawasan industri di Batang yang disebut dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) untuk mendorong pertumbuhan Jawa Tengah 7 persen pada tahun 2024–2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang digodok dalam Forum perangkat Daerah. Namun sejumlah proyek ini tidak semua berjalan dengan baik karena adanya pandemi pada tahun 2020. Tahun 2021 kembali menguat dengan pertumbuhan 6,84 persen dan tahun 2022 justru melambat di angka 1,99 persen, dan di tahun 2023 total pertumbuhan PMTB kembali menguat dengan capaian pertumbuhan sebesar 4,36 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai ekonomi investasi sudah mampu kembali seperti masa prapandemi atau nilai ekonomi tahun 2019, dengan pertumbuhan sebesar 4,85 di tahun 2023 dan terus menguat di tahun 2024 sebesar 6,55 persen.

Tabel 4.7. Perkembangan dan Struktur PMTB 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)					
a. ADHB (Miliar Rp)	417.815,40	451.241,16	478.531,39	508.526,41	555.015,00
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	278.024,57	297.028,56	302.949,24	315.755,79	336.453,49
Proporsi terhadap PDRB (Persentase ADHB)	31,01	31,78	30,69	29,99	30,53
Struktur PMTB (ADHB)					
a. Bangunan (Miliar Rp)	355.684,85	386.516,37	408.927,63	435.382,40	477.045,92
(Persentase)	85,13	85,66	85,45	85,62	85,95
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	62.130,54	64.724,78	69.603,76	73.144,00	77.969,08
(Persentase)	14,87	14,34	14,55	14,38	14,05
Total PMTB (Miliar Rp)	417.815,40	451.292,66	478.531,39	508.526,41	555.015,00
(Persentase)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (Persen)					
a. Bangunan	-5,83	7,08	1,57	4,64	7,21
b. Non Bangunan	-13,53	5,34	4,64	1,68	2,43
Total PMTB	-6,98	6,84	1,99	4,23	6,55

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Perubahan inventori secara konsep merupakan perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital) selama kurang waktu tertentu. Dalam PDRB tahunan, perubahan yang dimaksud adalah selisih persediaan pada akhir tahun dikurangi dengan persediaan pada awal tahun. Komponen perubahan inventori dapat memiliki hasil positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti

terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna.

Hal utama yang dapat dilihat dari komponen perubahan inventori adalah proporsi. Dalam PDRB pada umumnya perubahan inventori mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif). Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 proporsinya sebesar 0,68 persen, terendah dalam kurun waktu 2020 sampai 2024. Adapun yang tertinggi sebesar 1,02 persen terjadi pada tahun 2023. Secara rata-rata nilai proporsi inventori terhadap total PDRB di kisaran angka 1 persen (Tabel 4.8). Perubahan inventori merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian inventori merupakan bagian dari investasi, sedangkan perubahan inventori terjadi karena adanya proses produksi maupun impor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan peningkatan berbagai komponen pendukungnya.

Tabel 4.8. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	12.797,37	11.936,47	15.501,48	17.274,44	12.415,21
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	13.797,41	9.475,50	11.991,20	12.531,30	8.704,43
Proporsi terhadap PDRB (ADHB) Persentase	0,95	0,84	0,99	1,02	0,68

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Nilai ekspor ke luar negeri dari Jawa Tengah atas dasar harga berlaku di tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2024 total ekspor ADHB mencapai 178,71 triliun rupiah, berada di atas angka tahun 2023 yang sebesar 159,21 triliun rupiah, namun tidak lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang mencapai nilai sebesar 182,91 triliun rupiah. Angka pada tahun 2022 merupakan tertinggi sepanjang tahun 2020–2024. Demikian juga dengan ekspor ke luar negeri atas dasar harga konstan tahun 2024 juga meningkat dan mencapai 114,98 triliun rupiah dibanding 2023 yang sebesar 103,50 triliun rupiah, namun tidak lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang sebesar 115,03 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan adanya sinyal pemulihan ekonomi Jawa Tengah.

Komoditas utama ekspor Jawa Tengah ke luar negeri pada tahun 2024 adalah pakaian dan aksesorisnya (bukan rajutan). Komoditas ini mendominasi ekspor Jawa Tengah dengan kontribusi paling besar pada total ekspor Jawa Tengah, yaitu sebesar 19,55 persen di tahun 2024 dan menurun dibanding tahun 2023 yang berkontribusi sebesar 20,92 persen. Sementara itu, barang rajutan, alas kaki serta kayu dan barang dari kayu memberikan kontribusi masing-masing sebesar 12,68 persen, 11,41 persen dan 10,34 persen dari total ekspor Jawa Tengah non migas. Pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi, ekspor mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, terlebih di tahun 2023. Berbagai komoditas non migas mengalami pertumbuhan nilai ekspor lebih dari 50 persen. Seperti binatang hidup, sutera, garam, wol atau bulu hewan, serat tekstil, tutup kepala, aluminium, seng, kapal terbang dan bagiannya serta hasil karya seni.

Negara tujuan utama ekspor non migas Jawa Tengah adalah Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok. Pada tahun 2024 nilai ekspor masing-masing mencapai US\$429,11 juta, US\$79,12 juta, dan US\$53,99 juta. Kontribusi ekspor Jawa Tengah ke negara-negara tersebut sebesar 56,07 persen terhadap total nilai ekspor Jawa Tengah pada tahun 2024.

Ditinjau dari komoditas migas dan non migas, ekspor komoditas non migas memberi peranan sebesar 96,26 persen terhadap total ekspor Jawa Tengah pada tahun 2024, hampir sama dengan tahun sebelumnya yang sebesar 96,48. Sementara ekspor komoditas migas berperan 2,12 persen di tahun 2023 dan meningkat menjadi sebesar 3,74 persen di tahun 2024 terhadap total ekspor Jawa Tengah. Demikian halnya jika dibedakan komoditas ekspor barang sangat dominan, dengan besaran lebih dari 99 persen dan ekspor jasa di kisaran 0,3 persen.

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekspor barang berkontraksi sebesar -10,07 persen dan di tahun 2024 meningkat sebesar 11,12 persen, sedangkan ekspor jasa di tahun 2024 tumbuh 2,02 persen dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,77 persen, meskipun tidak lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang tumbuh mencapai sebesar 11,01 persen.

**Tabel 4.9 Perkembangan dan Struktur Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri,
2020–2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor Luar Negeri					
a. ADHB (Miliar Rp)	122.859,71	158.820,64	182.912,87	159.209,39	178.707,14
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	85.535,25	104.222,20	115.030,49	103.498,33	114.980,33
Proporsi terhadap PDRB (Persentase ADHB)	9,12	11,19	11,73	9,39	9,83
Struktur Ekspor Luar Negeri					
a. Barang (Miliar Rp)	121.711,27	158.338,23	182.342,34	158.597,66	178.085,99
(Persentase)	99,07	99,70	99,69	99,62	99,65
b. Jasa (Miliar Rp)	1.148,44	482,42	570,53	611,73	621,15
(Persentase)	0,93	0,30	0,31	0,38	0,35
Pertumbuhan (Persen)					
a. Barang (Persen)	-3,22	22,48	10,37	-10,07	11,12
b. Jasa (Persen)	-45,45	-59,35	11,01	6,77	2,02
Total ekspor (Persen)	-3,79	21,85	10,67	-10,03	11,09

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai impor luar negeri Jawa Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2024 sebesar 251,78 triliun rupiah, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 230,82 triliun rupiah. Nilai impor tertinggi di tahun 2022 di sepanjang tahun 2020–2024, kemudian terjadi penurunan impor selama dua tahun berturut dari 2019 sebesar 203,95 triliun rupiah dan turun menjadi 149,43 triliun tahun 2020. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19. Namun, kembali meningkat setelah terjadi pemulihan ekonomi tahun 2021 yang mencatatkan nilai impor luar negeri Jawa Tengah sebesar 200,73 triliun rupiah dan meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 240,42 triliun rupiah.

Produk migas dari luar negeri berupa minyak dan minyak mentah memberi kontribusi sebesar 46,08 persen di tahun 2024, turun disbanding sebelumnya yang sebesar 48,53 persen total impor barang ke luar negeri dari Jawa Tengah. Untuk komoditas impor non migas utama adalah mesin-mesin mekanik yang digunakan sebagai barang modal, dengan share sebesar 13,20 persen dari total impor pada tahun 2024. Berbagai komoditas impor mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

seperti mesin, plastik dan barang dari plastik, mesin dan perlengkapan elektrik, kapas, biji-bijian, minuman, gula dan kembang gula, filamen buatan dan kain rajutan. Negara pemasok barang impor terbesar ke Jawa Tengah selama tahun 2024 adalah Tiongkok (US\$3970,44 juta), Amerika (US\$564,44 juta) dan Australia (US\$219.42). Kontribusi dari ketiga negara asal impor barang tersebut mampu menyumbang sebesar 60,63 persen terhadap total impor Jawa Tengah pada tahun 2024.

Tabel 4.10 Perkembangan dan Struktur Impor Barang dan Jasa Luar Negeri, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	149.426,64	200.734,60	240.424,08	230.819,93	251.775,56
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	105.879,99	143.700,50	166.454,64	159.020,50	173.799,26
Proporsi terhadap PDRB (Persentase ADHB)	11,09	14,14	15,42	13,6	13,85
Struktur Impor (Persentase ADHB)					
a. Barang (Miliar Rp)	145.335,64	196.481,67	235.140,72	225.055,45	245.398,80
(Persentase)	97,26	97,88	97,80	97,50	97,47
b. Jasa (Miliar Rp)	4.090,99	4.252,93	5.283,35	5.773,68	6.376,76
(Persentase)	2,74	2,12	2,20	2,50	2,53
Pertumbuhan (Persen)					
a. Barang	-20,02	36,53	15,84	-4,64	9,3
b. Jasa	-35,33	4,25	15,47	4,67	8,95
Total impor	-20,49	35,72	15,83	-4,47	9,29

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Jika dirinci menurut golongan penggunaan barang ekonomi, nilai impor Jawa Tengah selama tahun 2024 didominasi oleh bahan baku/penolong mengalami peningkatan sebesar US\$372,90 juta (46,16 persen), sedangkan barang konsumsi naik US\$17,94 juta (24,32 persen). Begitu pula produk barang modal mengalami peningkatan sebesar US\$14,84 juta (19,13 persen).

Hal ini menunjukkan sebagian besar industri di Jawa Tengah masih mengandalkan bahan baku dan penolong dari impor untuk mendukung proses produksinya. Kondisi ini selain memboroskan devisa juga sangat rentan bagi industri lokal ketika ada gejolak di negara-negara produsen komoditas bahan baku dan penolong tersebut. Sehingga kebijakan penggunaan bahan baku lokal atau domestik dapat dipertimbangkan dan dioptimalkan untuk mengurangi beban biaya input dan menekan devisa.

Disisi lain, kadang bahan baku lokal belum terpenuhi dari dalam negeri sebagai input produksi dan harga yang relative tinggi menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

4.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Konsep antar daerah yang dimaksud adalah antar provinsi yang terjadi di wilayah Indonesia. Artinya pada pembahasan ini, ekspor dari Jawa Tengah ke provinsi lain dan impor dari provinsi lain yang masuk ke Jawa Tengah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sehingga dalam penghitungan net ekspor antar daerah menggunakan metode *cross-hauling*.

Metode *cross-hauling* bekerja dengan memanfaatkan sifat *balancing* atas permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor-impor dengan metode *cross hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan dummy Tabel Input-Output. Dalam metode ini transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Tabel 4.11 Net Ekspor Antar Daerah, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor Antar Daerah					
ADHB (Miliar Rp)	6.337,70	26.393,48	60.687,19	78.746,77	70.618,06
a. Ekspor	366.091,24	409.203,29	445.801,37	473.712,55	534.241,64
b. Impor	359.753,54	382.809,81	385.114,18	394.965,78	463.623,59
ADHK 2010 (Miliar Rp)	48.576,46	74.241,19	60.687,19	78.746,77	70.618,06
a. Ekspor	247.935,81	286.969,46	317.156,86	331.860,19	367.153,99
b. Impor	199.359,35	212.728,27	219.269,26	228.485,72	260.189,31
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,47	1,86	3,93	4,60	3,88

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber data yang tersedia selama ini menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen net ekspor (dalam series PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang yaitu perbedaan antara total PDRB

menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen net ekspor secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori net ekspor antar daerah menghasilkan 2 (dua) angka positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Kontribusi net ekspor antar daerah dalam kurun waktu 2020–2024 selalu bernilai positif baik ADHB maupun ADHK. Hal ini menunjukkan nilai ekspor antar daerah lebih besar dari nilai impornya atau perdagangan antar daerah Provinsi Jawa Tengah dengan provinsi-provinsi lain selalu mengalami surplus (Tabel 4.11). Peningkatan net ekspor antar daerah juga mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara total. Sehingga ekspor antar daerah harus ditingkatkan untuk memacu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Output bayangan dalam metode ini menunjukkan bahwa transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024** (PERSEN)



61,29

PENGELUARAN
KONSUMSI
RUMAH TANGGA

6,25

PENGELUARAN
KONSUMSI
PEMERINTAH

0,68

PERUBAHAN
INVENTORI

13,85

IMPOR LUAR
NEGERI

1,39

PENGELUARAN
KONSUMSI
LNPRT

30,53

PEMBENTUKAN
MODAL TETAP
BRUTO

9,83

EKSPOR LUAR
NEGERI

3,88

NET EKSPOR
ANTAR DAERAH



5 PENUTUP

1. Ekonomi dunia sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 (-4,30 persen). Tahun 2021–2024 perekonomian global mulai bangkit dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,20 persen di tahun 2021 dan terus berlanjut hingga tahun 2022 meski melambat namun menunjukkan angka yang positif sebesar 3,20 persen di tahun 2024.
2. Pemulihan ekonomi global pada tahun 2021 dan terus berlanjut hingga 2024 sebagian besar didorong oleh belanja konsumen yang meningkat dan investasi atau penanaman modal. Pembukaan kran ekonomi Tiongkok semakin menguatkan pemulihan pertumbuhan ekonomi global, meski perang Rusia-Ukraina tak kunjung usai, namun mampu meredam inflasi di berbagai negara.
3. Aktivitas Ekonomi di Indonesia pasca pandemi mulai menunjukkan transaksi positif dan tercatat tumbuh sebesar 3,70 persen di tahun 2021, tahun 2022 ekonomi tumbuh sebesar 5,31 persen, tahun 2023 ekonomi tumbuh sebesar 5,05 persen, dan tahun 2024 ekonomi tumbuh stabil sebesar 5,03 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ini ditopang oleh seluruh komponen PDRB dari sisi konsumsi yang tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi komponen PKLNPRRT sebesar 12,48 persen.
4. PDRB Jawa Tengah tahun 2024 Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 1.817,77 triliun rupiah dengan share terbesar dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) sebesar 61,29 persen dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sebesar 30,53 persen.
5. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 4,95 persen melambat dibanding 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2024 ditopang oleh pertumbuhan positif di hampir seluruh komponen utama pengeluaran tumbuh positif yaitu PKRT (5,15 persen), PKLNPRRT tumbuh mencapai 16,38 persen, PKP (3,01 persen), PMTB (6,55 persen), dan net ekspor 3,47 persen.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara di Dunia (persen), 2020–2024

World Economic Outlook, January 2025 Update

Negara	2020	2021	2022	2023	2024 ^e
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. United States of America	-2,21	5,80	1,94	2,90	2,80
2. Eropa (Euro Area)	-6,07	5,93	3,40	0,60	1,00
3. Jepang	-4,15	2,56	0,96	1,50	-0,20
4. China	2,24	8,45	2,99	5,24	4,80
5. Federasi Rusia	-2,65	5,99	-1,20	3,60	3,80
6. Brazil	-3,28	4,76	3,02	3,20	3,70
7. Mexico	-8,62	5,74	3,95	3,30	1,80
8. Arab Saudi	-3,58	5,07	7,49	-0,80	1,40
9. India	-5,78	9,70	6,99	8,20	6,50
10. Nigeria	-1,79	3,65	3,25	2,90	3,10
11. Afrika Selatan	-5,96	4,70	1,91	0,70	0,88
Dunia	-2,70	6,48	3,46	3,30	3,20

Catatan: ^e angka estimasi

Lampiran 2 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku 2010
Menurut Komponen Pengeluaran (miliar rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	8.899.917,58	9.236.049,11	10.161.733,46	11.109.565,97	11.964.946,62
a. Makanan, Minuman selain Restoran	3.669.993,47	3.803.853,38	4.173.985,32	4.542.099,25	4.925.152,21
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	316.446,60	319.886,33	339.007,72	358.339,99	370.749,13
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1.186.899,96	1.223.129,69	1.296.545,46	1.375.977,68	1.445.425,69
d. Kesehatan dan Pendidikan	652.831,63	677.159,59	708.942,03	755.651,11	801.067,94
e. Transportasi dan Komunikasi	1.796.642,85	1.861.337,41	2.165.475,62	2.469.012,38	2.673.353,00
f. Restoran dan Hotel	853.216,32	909.182,31	1.006.403,67	1.104.034,37	1.201.577,63
g. Lainnya	423.886,75	441.500,39	471.373,63	504.451,18	547.621,01
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	201.451,56	207.916,21	228.999,01	261.210,19	300.080,40
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.491.171,66	1.569.830,29	1.505.007,91	1.557.495,58	1.711.550,85
a. Konsumsi Kolektif	897.223,32	902.552,44	904.343,88	963.842,56	1.076.657,10
b. Konsumsi Individu	593.948,34	667.277,85	601.940,90	593.653,01	634.893,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.897.049,69	5.227.853,94	5.697.279,18	6.090.676,73	6.452.530,73
a. Bangunan	3.719.738,79	3.933.012,08	4.209.054,53	4.522.517,00	4.805.679,20
b. Mesin dan Perlengkapan	477.468,14	535.062,48	660.827,07	692.426,99	771.628,54
c. Kendaraan	223.484,72	258.006,92	297.345,02	352.847,12	323.699,57
d. Peralatan Lainnya	75.728,97	84.536,96	85.676,41	85.001,87	96.791,97
e. CBR	282.565,06	292.469,93	307.720,41	287.075,95	296.847,62
f. Produk Kekayaan Intelektual	118.064,01	124.765,59	136.655,74	150.807,80	157.883,83
5. Perubahan Inventori	97.857,67	111.142,96	129.369,69	248.602,18	498.296,82
6. Ekspor Barang dan Jasa	2.676.513,53	3.635.835,41	4.799.815,44	4.544.889,57	4.911.155,65
a. Barang	2.464.004,44	3.440.204,33	4.458.855,25	4.039.344,76	4.297.886,49
a.1. Barang Non Migas	2.335.820,77	3.249.263,02	4.196.760,22	3.775.709,99	4.025.298,70
a.2. Barang Migas	128.183,67	190.941,32	262.095,03	263.634,77	272.587,79
b. Jasa	212.509,09	195.631,07	340.960,20	503.544,81	613.269,17
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2.415.495,97	3.189.626,45	4.106.085,66	4.091.231,54	4.513.987,41
a. Barang	2.056.090,61	2.781.637,45	3.459.520,32	3.303.824,11	3.598.181,55
a.1. Barang Non Migas	1.850.263,66	2.419.448,70	2.870.427,90	2.768.533,74	3.037.829,81
a.2. Barang Migas	205.826,94	362.188,75	589.092,43	535.290,37	560.351,74
b. Jasa	359.405,36	407.989,00	646.565,34	784.407,43	915.805,86
Diskrepansi Statistik	-405.112,52	177.749,93	1.171.970,88	1.171.139,82	814.390,35
PDB	15.443.353,20	16.976.751,40	19.588.089,90	20.892.348,50	22.138.964,00

Catatan: * angka sementara

** angka sangat sementara

Lampiran 3. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Komponen Pengeluaran (miliar rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5.780.223,44	5.896.661,85	6.187.943,90	6.486.253,87	6.806.403,46
h. Makanan, Minuman selain Restoran	2.190.250,95	2.222.126,49	2.298.902,16	2.378.092,30	2.479.203,16
i. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	221.190,80	221.042,12	230.575,09	240.891,54	247.025,82
j. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	814.540,29	832.371,64	855.635,10	888.144,19	926.733,93
k. Kesehatan dan Pendidikan	430.533,98	437.835,19	448.391,77	466.265,12	485.004,50
l. Transportasi dan Komunikasi	1.333.608,96	1.368.171,38	1.496.542,92	1.610.203,24	1.725.850,05
m. Restoran dan Hotel	516.212,06	536.203,53	571.448,69	607.899,69	647.609,83
n. Lainnya	273.886,40	278.911,50	286.448,17	294.757,78	304.976,17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	130.306,47	132.411,92	139.903,63	153.938,46	173.142,79
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	874.145,57	911.319,71	871.026,38	897.299,04	956.623,31
c. Konsumsi Kolektif	527.045,91	522.786,59	520.994,33	553.746,59	600.042,32
d. Konsumsi Individu	347.099,65	388.533,12	350.035,06	343.552,45	356.581,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.419.181,61	3.549.218,80	3.686.573,75	3.825.222,04	4.001.693,30
g. Bangunan	2.585.622,97	2.645.502,22	2.669.608,59	2.777.458,40	2.930.607,42
h. Mesin dan Perlengkapan	342.342,23	382.273,44	468.068,04	482.504,35	518.808,35
i. Kendaraan	168.223,66	187.893,93	207.182,85	239.647,31	214.910,22
j. Peralatan Lainnya	51.979,25	56.790,14	56.630,20	54.432,81	60.759,30
k. CBR	195.075,90	197.336,28	201.522,65	182.150,52	185.360,29
l. Produk Kekayaan Intelektual	75.937,60	79.422,79	83.561,41	89.028,64	91.247,72
5. Perubahan Inventori	51.334,13	62.709,09	70.749,22	127.672,38	246.652,07
6. Ekspor Barang dan Jasa	2.083.941,85	2.458.849,06	2.858.016,46	2.896.371,89	3.085.059,13
a. Barang	1.956.816,4	2.347.224,78	2.683.342,66	2.652.779,10	2.806.875,26
a.1. Barang Non Migas	1.768.806,92	2.127.473,21	2.471.996,56	2.423.738,70	2.572.394,50
a.2. Barang Migas	188.009,55	219.751,57	211.346,10	229.040,40	234.480,76
b. Jasa	127.125,38	111.624,28	174.615,35	243.592,79	278.183,86
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.686.003,79	2.105.117,06	2.420.793,78	2.382.009,53	2.571.355,65
a. Barang	1.498.606,17	1.897.577,90	2.133.092,24	2.059.810,70	2.227.673,78
a.1. Barang Non Migas	1.271.236,30	1.627.636,87	1.813.699,78	1.732.121,46	1.888.237,77
a.2. Barang Migas	227.369,87	269.941,03	319.392,46	327.689,28	339.436,01
b. Jasa	187.397,62	207.539,16	287.701,50	322.198,83	343.681,88
Diskrepansi Statistik	69.870,03	214.006,34	316.826,09	296.726,95	222.063,29
PDB	10.722.999,30	11.120.059,70	11.710.223,20	12.301.475,10	12.920.281,70

Catatan: * angka sementara
 ** angka sangat sementara

**Lampiran 4 Distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ADH Berlaku
Menurut Komponen Pengeluaran (miliar rupiah), 2020–2024**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	57,63	54,4	51,88	53,18	54,04
a. Makanan, Minuman selain Restoran	23,76	22,41	21,31	21,74	22,25
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,05	1,88	1,73	1,72	1,67
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	7,69	7,2	6,62	6,59	6,53
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,23	3,99	3,62	3,62	3,62
e. Transportasi dan Komunikasi	11,63	10,96	11,05	11,82	12,08
f. Restoran dan Hotel	5,52	5,36	5,14	5,28	5,43
g. Lainnya	2,74	2,6	2,41	2,41	2,47
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,3	1,22	1,17	1,25	1,36
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,66	9,25	7,69	7,45	7,73
a. Konsumsi Kolektif	5,81	5,32	4,62	4,61	4,86
b. Konsumsi Individu	3,85	3,93	3,07	2,84	2,87
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,71	30,79	29,08	29,15	29,15
a. Bangunan	24,09	23,17	21,49	21,65	21,71
b. Mesin dan Perlengkapan	3,09	3,15	3,37	3,31	3,49
c. Kendaraan	1,45	1,52	1,52	1,69	1,46
d. Peralatan Lainnya	0,49	0,5	0,44	0,41	0,44
e. CBR	1,83	1,72	1,57	1,37	1,34
f. Produk Kekayaan Intelektual	0,76	0,73	0,7	0,72	0,71
5. Perubahan Inventori	0,63	0,65	0,66	1,19	2,25
6. Ekspor Barang dan Jasa	17,33	21,42	24,5	21,75	22,18
a. Barang	15,96	20,26	22,76	19,33	19,41
a.1. Barang Non Migas	15,13	19,14	21,42	18,07	18,18
a.2. Barang Migas	0,83	1,12	1,34	1,26	1,23
b. Jasa	1,38	1,15	1,74	2,42	2,77
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	15,64	18,79	20,96	19,58	20,39
a. Barang	13,31	16,38	17,66	15,81	16,25
a.1. Barang Non Migas	11,98	14,25	14,65	13,25	13,72
a.2. Barang Migas	1,33	2,13	3,01	2,56	2,53
b. Jasa	2,33	2,40	3,30	3,77	4,14
Diskrepansi Statistik	-2,62	1,05	5,98	5,61	3,68
PDB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * angka sementara
** angka sangat sementara

Lampiran 5. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ADH Konstan 2010
Menurut Komponen Pengeluaran (miliar rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	-2,63	2,01	4,94	4,82	4,94
a. Makanan, Minuman selain Restoran	0,51	1,46	3,46	3,44	4,25
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	-4,21	-0,07	4,31	4,47	2,55
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2,28	2,19	2,79	3,80	4,34
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,09	1,70	2,41	3,99	4,02
e. Transportasi dan Komunikasi	-9,57	2,59	9,38	7,59	6,56
f. Restoran dan Hotel	-8,14	3,87	6,57	6,38	6,53
g. Lainnya	-0,65	1,83	2,70	2,90	3,47
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,21	1,62	5,66	10,03	12,48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,12	4,25	-4,42	3,02	6,61
a. Konsumsi Kolektif	-0,84	-0,81	-0,34	6,13	8,36
b. Konsumsi Individu	6,98	11,94	-9,91	-1,85	3,79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-4,96	3,80	3,87	3,76	4,61
a. Bangunan	-3,78	2,32	0,91	4,04	5,51
b. Mesin dan Perlengkapan	-11,54	11,66	22,44	3,08	7,52
c. Kendaraan	-13,07	11,69	10,27	15,67	-10,32
d. Peralatan Lainnya	-10,56	9,26	-0,28	-3,88	11,62
e. CBR	2,81	1,16	2,12	-9,61	1,76
f. Produk Kekayaan Intelektual	-7,36	4,59	5,21	6,54	2,49
5. Perubahan Inventori	—	—	—	—	—
6. Ekspor Barang dan Jasa	-8,42	17,99	16,23	1,34	6,51
a. Barang	-3,46	19,95	14,32	-1,14	5,81
a.1. Barang Non Migas	-3,32	20,28	16,19	-1,95	6,13
a.2. Barang Migas	-4,72	16,88	-3,82	8,37	2,38
b. Jasa	-48,87	-12,19	56,43	39,50	14,20
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-17,60	24,86	15,00	-1,60	7,95
a. Barang	-14,68	26,62	12,41	-3,44	8,15
a.1. Barang Non Migas	-14,43	28,04	11,43	-4,50	9,01
a.2. Barang Migas	-16,07	18,72	18,32	2,60	3,58
b. Jasa	-35,33	10,75	38,63	11,99	6,67
PDB	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Catatan: * angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020–2024**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	822.095,50	854.472,69	940.909,55	1.033.375,35	1.114.046,54
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	325.686,65	346.663,20	384.705,48	426.353,00	465.764,55
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	33.839,36	34.399,74	36.374,19	38.201,99	39.807,48
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	105.607,59	107.967,32	112.583,52	121.065,17	126.857,47
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	67.872,76	70.125,38	72.645,93	75.062,06	78.604,46
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	203.968,62	206.555,29	238.635,91	268.172,01	290.995,91
1.f. Hotel dan Restoran	67.644,90	70.772,25	76.552,67	83.722,33	90.155,13
1.g. Lainnya	17.475,61	17.989,52	19.411,85	20.798,06	21.861,56
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	16.064,61	16.784,70	18.990,24	21.140,37	25.220,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	98.678,84	100.820,61	102.031,73	108.168,76	113.530,27
3.a. Konsumsi Kolektif	49.878,84	50.245,31	52.417,99	55.733,54	59.689,57
3.b. Konsumsi Individu	48.800,00	50.575,30	49.613,73	52.435,22	53.840,70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	417.815,40	451.241,16	478.531,39	508.526,41	555.015,00
4.a. Bangunan	355.684,85	386.516,37	408.927,63	435.382,40	477.045,92
4.b. Non-Bangunan	62.130,54	64.724,78	69.603,76	73.144,00	77.969,08
5. Perubahan Inventori	12.797,37	11.936,47	15.501,48	17.274,44	12.415,21
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	122.859,71	158.820,64	182.912,87	159.209,39	178.707,14
6.a. Barang	121.711,27	158.338,23	182.342,34	158.597,66	178.085,99
6.b. Jasa	1.148,44	482,42	570,53	611,73	621,15
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	149.426,64	200.734,60	240.424,08	230.819,93	251.775,56
7.a. Barang	145.335,64	196.481,67	235.140,72	225.046,24	245.398,80
7.b. Jasa	4.090,99	4.252,93	5.283,35	5.773,68	6.376,76
8. Net Ekspor Antar Daerah	6.337,70	26.393,48	60.687,19	78.746,77	70.618,06
P D R B	1.347.222,49	1.419.735,15	1.559.140,36	1.695.621,56	1.817.776,96

Catatan: * angka sementara

** angka sangat sementara

Lampiran 7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	573.976,75	584.447,30	616.679,57	651.723,53	685.307,23
1.a. Makanan. Minuman. dan Rokok	204.123,14	207.883,15	218.893,48	229.617,64	239.796,39
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	27.958,37	28.023,33	28.770,83	29.628,30	30.502,84
1.c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	73.822,71	74.407,60	75.334,89	79.974,89	83.210,56
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	50.247,80	50.342,92	51.443,22	52.210,76	53.721,93
1.e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	157.288,17	162.903,47	179.032,75	193.470,71	208.085,64
1.f. Hotel dan Restoran	48.142,81	48.472,20	50.446,83	53.624,24	56.571,25
1.g. Lainnya	12.393,74	12.414,62	12.757,57	13.196,99	13.418,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10.198,08	10.326,06	10.842,65	11.638,89	13.545,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	60.998,75	61.280,82	61.351,97	62.971,77	64.870,03
3.a. Konsumsi Kolektif	30.303,87	29.885,14	30.588,05	31.278,34	32.834,41
3.b. Konsumsi Individu	30.694,88	31.395,68	30.763,92	31.693,43	32.035,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	278.024,57	297.028,56	302.949,27	315.755,79	336.453,49
4.a. Bangunan	239.391,09	256.331,50	260.365,19	272.458,28	292.102,41
4.b. Non-Bangunan	38.633,48	40.697,05	42.584,07	43.297,51	44.351,08
5. Perubahan Inventori	13.797,41	9.475,50	11.991,20	12.531,30	8.704,43
6. Ekspor Luar Negeri	85.535,25	104.222,20	115.030,49	103.498,33	114.980,33
6.a. Barang	84.876,72	103.954,54	114.733,35	103.181,07	114.656,66
6.b. Jasa	658,54	267,66	297,14	317,26	323,67
7. Impor Luar Negeri	105.879,99	143.700,50	166.454,64	159.020,50	173.799,26
7.a. Barang	103.232,08	140.940,04	163.267,02	155.684,10	170.164,10
7.b. Jasa	2.647,91	2.760,46	3.187,63	3.336,40	3.635,16
8. Net Ekspor Antar Daerah	48.576,46	74.241,19	97.887,60	103.374,47	106.964,68
PDRB	965.227,27	997.321,13	1.050.278,09	1.102.473,58	1.157.025,94

Catatan: * angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 8 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (persen), 2020–2024**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,02	60,19	60,35	60,90	61,29
a. Makanan. Minuman dan Rokok	24,17	24,42	24,67	25,14	25,62
b. Pakaian & Alas Kaki	2,51	2,42	2,33	2,25	2,19
c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,84	7,60	7,22	7,14	6,98
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,04	4,94	4,66	4,42	4,32
e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	15,14	14,55	15,30	15,80	16,01
f. Hotel dan Restoran	5,02	4,98	4,91	4,94	4,96
g. Lainnya	1,30	1,27	1,25	1,23	1,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,19	1,18	1,22	1,25	1,39
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,32	7,10	6,54	6,38	6,25
a. Konsumsi Kolektif	3,70	3,54	3,36	3,29	3,28
b. Konsumsi Individu	3,62	3,56	3,18	3,09	2,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	31,01	31,78	30,69	29,99	30,53
a. Bangunan	26,40	27,22	26,23	25,68	26,24
b. Non-Bangunan	4,61	4,56	4,46	4,31	4,29
5. Perubahan Inventori	0,95	0,84	0,99	1,02	0,68
6. Ekspor Luar Negeri	9,12	11,19	11,73	9,39	9,83
a. Barang	9,03	11,15	11,70	9,35	9,80
b. Jasa	0,09	0,03	0,04	0,04	0,03
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	11,09	14,14	15,42	13,61	13,85
a. Barang	10,79	13,84	15,08	13,27	13,50
b. Jasa	0,30	0,30	0,34	0,34	0,35
8. Net Ekspor Antar Daerah	0,47	1,86	3,93	4,60	3,88
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (persen), 2020–2024**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	-1,42	1,82	5,52	5,68	5,15
a. Makanan. Minuman dan Rokok	1,31	1,84	5,30	4,90	4,43
b. Pakaian & Alas Kaki	1,03	0,23	2,67	2,98	2,95
c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,55	0,79	1,25	6,16	4,05
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,53	0,19	2,19	1,49	2,89
e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	-5,89	3,57	9,90	8,06	7,55
f. Hotel dan Restoran	-6,73	0,68	4,07	6,30	5,50
g. Lainnya	0,17	0,17	2,76	3,44	1,68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-3,72	1,25	5,00	7,34	16,38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-4,14	0,46	0,12	2,64	3,01
a. Konsumsi Kolektif	-4,71	-1,38	2,35	2,46	4,97
b. Konsumsi Individu	-3,56	2,28	-2,01	3,02	1,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6,98	6,84	1,99	4,23	6,55
a. Bangunan	-5,83	7,08	1,57	4,64	7,21
b. Non-Bangunan	-13,53	5,34	4,64	1,68	2,43
5. Perubahan Inventori	—	—	—	—	—
6. Ekspor Luar Negeri	-3,79	21,85	10,37	-10,03	11,09
a. Barang	-3,22	22,48	10,37	-10,07	11,12
b. Jasa	-45,45	-59,35	11,01	6,77	2,02
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-20,49	35,72	15,83	-4,47	9,29
a. Barang	-20,02	36,53	15,84	-4,64	9,30
b. Jasa	-35,33	4,25	15,47	4,67	8,95
8. Net Ekspor Antar Daerah	-13,12	6,71	3,07	4,20	13,88
PDRB	-2,65	3,33	5,31	4,97	4,95

Catatan: * angka sementara

** angka sangat sementara

Lampiran 10 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Tahun 2010=100)
Jawa Tengah menurut Pengeluaran, 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	143,23	146,20	152,58	158,56	162,56
a. Makanan. Minuman dan Rokok	159,55	166,76	175,75	185,68	194,23
b. Pakaian & Alas Kaki	121,03	122,75	126,43	128,94	130,50
c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	143,06	145,10	149,44	151,38	152,45
d. Kesehatan dan Pendidikan	135,08	139,30	141,22	143,77	146,32
e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	129,68	126,80	133,29	138,61	139,84
f. Hotel dan Restoran	140,51	146,01	151,75	156,13	159,37
g. Lainnya	141,00	144,91	152,16	157,60	162,92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	157,53	162,55	175,14	181,64	186,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	161,77	164,52	166,31	171,77	175,01
a. Konsumsi Kolektif	164,60	168,13	171,37	178,19	181,8
b. Konsumsi Individu	159,00	161,09	161,27	165,45	168,1
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	150,28	151,92	157,96	161,05	165,0
a. Bangunan	148,58	150,79	157,06	159,80	163,3
b. Non-Bangunan	160,82	159,04	163,45	168,93	175,8
5. Perubahan Inventori	—	—	—	—	—
6. Ekspor Luar Negeri	143,64	152,40	159,01	153,80	155,4
a. Barang	143,40	152,31	158,93	153,71	155,32
b. Jasa	174,39	180,23	192,01	192,82	191,91
7. Impor Luar Negeri	141,13	139,69	144,44	145,15	144,87
a. Barang	140,79	139,41	144,02	144,55	144,21
b. Jasa	154,50	154,07	165,75	173,05	175,42
8. Net Ekspor Antar Daerah	—	—	—	—	—
PDRB	139,58	142,35	148,45	153,80	157,11

Catatan: * angka sementara

** angka sangat sementara

Lampiran 11 Laju Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Tahun 2010=100)
Jawa Tengah menurut Pengeluaran (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1,46	2,08	4,36	3,92	2,52
a. Makanan. Minuman dan Rokok	2,05	4,52	5,39	5,65	4,60
b. Pakaian & Alas Kaki	3,47	1,42	2,99	1,99	1,21
c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,93	1,43	2,99	1,30	0,71
d. Kesehatan dan Pendidikan	-2,00	3,12	1,38	1,81	1,77
e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	0,99	-2,22	5,12	3,99	0,89
f. Hotel dan Restoran	0,03	3,91	3,93	2,89	2,08
g. Lainnya	6,11	2,77	5,01	3,58	3,38
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,48	3,19	7,75	3,71	2,51
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,26	1,70	0,96	3,28	1,89
a. Konsumsi Kolektif	-0,08	2,15	1,71	3,98	2,03
b. Konsumsi Individu	-0,44	1,32	0,08	2,59	1,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	0,18	1,09	3,98	1,96	2,45
a. Bangunan	0,58	1,49	4,16	1,74	2,19
b. Non-Bangunan	-1,37	-1,11	2,77	3,35	4,07
5. Perubahan Inventori	—	—	—	—	—
6. Ekspor Luar Negeri	0,00	6,09	4,35	-3,28	1,04
a. Barang	0,11	6,22	4,34	-3,28	1,05
b. Jasa	1,00	3,35	6,53	0,42	-0,47
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-7,85	-1,02	3,40	0,49	-0,19
a. Barang	-8,03	-0,98	3,31	0,37	-0,24
b. Jasa	-0,57	-0,28	7,58	4,40	1,37
8. Net Ekspor Antar Daerah	—	—	—	—	—
PDRB	1,69	1,99	4,31	3,60	2,15

Catatan: * angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 12 Andil Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah
Menurut Pengeluaran (persen), 2020–2024**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	-0,87	1,10	3,33	3,46	3,16
a. Makanan. Minuman dan Rokok	0,32	0,45	1,31	1,23	1,14
b. Pakaian & Alas Kaki	0,03	0,01	0,06	0,07	0,06
c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,04	0,06	0,09	0,44	0,28
d. Kesehatan dan Pendidikan	0,18	0,01	0,10	0,07	0,13
e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	-0,89	0,52	1,52	1,28	1,21
f. Hotel dan Restoran	-0,34	0,03	0,20	0,31	0,27
g. Lainnya	0,00	0,00	0,03	0,04	0,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-0,04	0,01	0,06	0,09	0,23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,30	0,03	0,01	0,17	0,19
a. Konsumsi Kolektif	-0,17	-0,05	0,08	0,07	0,16
b. Konsumsi Individu	-0,13	0,08	-0,06	0,09	0,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-2,16	2,17	0,61	1,27	2,00
a. Bangunan	-1,54	1,93	0,41	1,19	1,89
b. Non-Bangunan	-0,62	0,24	0,21	0,07	0,10
5. Perubahan Inventory	—	—	—	—	—
6. Ekspor Luar Negeri	-0,35	2,44	1,22	-0,94	1,09
a. Barang	-0,29	2,51	1,21	-0,94	1,09
b. Jasa	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00
7. Impor Luar Negeri	-2,27	5,05	2,44	-0,61	1,29
a. Barang	-2,16	5,06	2,39	-0,62	1,26
b. Jasa	-0,11	0,01	0,05	0,02	0,03
8. Lainnya	-0,16	0,98	1,24	0,26	0,13
Pertumbuhan PDRB	-4,90	4,54	3,01	1,30	3,13

Catatan: * angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 13 Nilai Ekspor Nonmigas Jawa Tengah Menurut Golongan Barang (juta US\$).
Perubahan (persen) dan Peranan (persen), 2023–2024**

No	Golongan Barang (HS 2 Digit)	Nilai (Juta US\$)		Perubahan (%) Jan-Des 2024 thd Jan- Des 2023 (c- to-c)	Peran thd total ekspor nonmigas 2024
		Jan-Des 2023	Jan-Des 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	62 Pakaian Jadi Bukan Rajutan	2.064,63	2.104,70	1,94	19,55
2	61 Pakaian dan aksesorinya (rajutan)	1.250,93	1.539,25	23,05	14,30
3	64 Alas kaki	1.124,41	1.407,19	25,15	13,07
4	44 Kayu, Barang dari Kayu	1.020,50	1.009,73	(1,06)	9,38
5	94 Perabotan, lampu, dan alat penerangan	735,86	807,23	9,70	7,50
6	42 Barang-barang dari Kulit	679,73	775,82	14,14	7,21
7	85 Mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya	403,21	450,69	11,78	4,19
8	03 Ikan, krustasea, dan moluska	171,81	226,12	31,61	2,10
9	55 Serat Stafel Buatan	274,59	212,27	(22,70)	1,97
10	38 Berbagai produk kimia	170,88	203,88	19,31	1,89
Total 10 Golongan Barang		7.896,55	8.736,88	3,77	10,642
Lainnya		1.970,60	2.026,80	-8,18	2,852
Total Ekspor Nonmigas		9.867,13	10.763,68	1,20	1,94

Catatan: Sumber Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Desember 2024,
15 Januari 2025

Lampiran 14 Nilai Ekspor Migas Jawa Tengah (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen), 2023–2024

No	Uraian	Nilai		Perubahan (%) Jan-Des 2024 thd Jan-Des 2023	Peran thd total ekspor 2024
		Jan-Des 2023	Jan-Des 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hasil Minyak	357,1	417,96	17,04	19,50
2	Gas	1,14	–	–	–
3	Gas Alam	–	–	–	–
4	Minyak Mentah	–	–	–	–
Total Ekspor Migas		358,24	417,96	16,67	3,74
Total Ekspor Nonmigas		9.867,13	10.763,68	9,09	96,26
Total Ekspor		10.225,37	11.181,64	9,35	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Desember 2024,
15 Januari 2025

**Lampiran 15 Nilai Ekspor Jawa Tengah Menurut Sektor (juta US\$), Perubahan (persen)
dan Peranan (persen), 2023–2024**

No	Uraian	Nilai (Juta US\$)		Perubahan (%) Jan-Des 2024 thd Jan-Des 2023	Peran thd total ekspor
		Jan-Des 2023	Jan-Des 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	- Pertanian	216,88	224,28	3,41	2,01
2	- Industri pengolahan	9.648,68	10.537,96	9,22	94,24
3	- Pertambangan dan Lainnya	1,57	1,44	-8,28	0,01
Total Ekspor Migas		9.867,13	358,24	417,96	16,67
Total Ekspor Nonmigas		358,24	9.867,13	10.763,68	9,09
Total Ekspor		10.225,37	10.225,37	11.181,64	9,35

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Desember 2024,
15 Januari 2025

**Lampiran 16 Nilai Impor Nonmigas Jawa Tengah Menurut Golongan Barang (juta US\$),
Perubahan (persen) dan Peranan (persen), 2023–2024**

No	Golongan Barang (HS 2 Digit)	Nilai (Juta US\$)		Perubahan (%) Jan-Des 2024 thd Jan- Des 2023 (c- to-c)	Peran thd Total Impor Nonmigas
		Jan-Des 2023	Jan-Des 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	84 Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	763,52	1035,34	35,60	13,66
2	39 Plastik dan Barang dari Plastik	599,32	713,63	19,07	9,42
3	85 Mesin / Peralatan Listik	712,74	661,19	-7,23	8,73
4	10 Gandum-gandum	411,73	565,14	37,26	7,46
5	60 Kain Rajutan	383,65	374,80	-2,31	4,95
6	12 Biji-bijian berminyak	370,01	341,30	-7,76	4,50
7	87 Kendaraan dan bagiannya	228,02	293,38	28,66	3,87
8	52 Kapas	344,40	271,78	-21,09	3,59
9	17 Gula dan Kembang Gula	281,72	236,31	-16,12	3,12
10	54 Filamen Buatan	293,80	223,22	-24,02	2,95
Total 10 Golongan Barang		4388,91	4716,09	7,45	7,45
Barang Lainnya		3072,45	3126,23	1,75	1,75
Total Impor Nonmigas		7461,36	7842,32	5,11	5,11

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Desember 2024,
17 Februari 2025

**Lampiran 17 Nilai Impor Migas Jawa Tengah (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen),
2023–2024**

No	Uraian	Nilai (Juta US\$)		Perubahan Jan-Des 2024 thd Jan-Des 2023 (c-to-c)	Peran thd total impor Jan-Des 2024
		Jan-Des 2023	Jan-Des 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hasil Minyak	1.317,05	1.242,94	-5,63	8,55
2	Gas	—	—	—	—
3	Gas Alam	—	—	—	—
4	Minyak Mentah	5.719,01	5.459,25	-4,54	37,53
Total Impor Migas		7.036,06	6.702,19	-4,75	46,08
Total Impor Nonmigas		7.461,36	7.842,32	5,11	53,92
Total Impor		14.497,42	14.544,51	0,32	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Desember 2024, 17 Februari 2025

Lampiran 18 Nilai Impor Jawa Tengah Menurut Golongan Penggunaan Barang, 2023–2024

Golongan Penggunaan Barang	Nilai (Juta US\$)		Peran Terhadap Total Impor	
	Jan-Des 2023	Jan-Des 2024	Jan-Des 2023	Jan-Des 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Barang Konsumsi	802,10	913,83	5,53	6,28
Bahan Baku/ Penolong	12.924,97	12.741,69	89,15	87,61
Barang Modal	770,35	888,99	5,31	6,11
Total Impor	14.497,42	14.544,51	100,00	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Desember 2024, 15 Januari 2025

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Pendapatan Nasional Indonesia 2019–2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2024. “[Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) 2024”. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1NiMy/-seri-2010--2--pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-konstan-menurut-pengeluaran--milyar-rupiah-.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2024. [Seri 2010] 1. PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah), 2024”. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1NSMy/-seri-2010--1--pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran--milyar-rupiah-.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2024. [Seri 2010] PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2010 - 2024”. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTYzMyMx/-seri-2010--pdrb-jawa-tengah-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran--miliar-rupiah---2010---2024.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2024. [Seri 2010] PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2010 - 2024”. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTYzNCMx/-seri-2010--pdrb-jawa-tengah-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-pengeluaran--miliar-rupiah---2010---2024.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2024. *Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Bulan Desember 2024*. Semarang: Berita Resmi Statistik. No. 05/01/33.Th.XIX (15 Januari 2025).
- Indonesia.go.id. 2024. Klasifikasi Terkini Kelas Ekonomi Negara. Portal Informasi Indonesia.
- International Monetary Fund (IMF). *World Economic Outlook Database (January 2024)* <https://www.imf.org/en/search#q=GDP%20Growth&sort=relevancy>.
- National Bureau of Statistics of China, 2024. <https://www.stats.gov.cn/english/>.
- United Nations (UN). Apa itu Perubahan Iklim. <https://indonesia.un.org/id/172909-apa-itu-perubahan-iklim> (indonesia.un.org)

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

JL. Pahlawan No. 6 50241

Telp. (024) 8412804, 8412805 Fax 8311195

Homepage : <https://jateng.bps.go.id> E-mail : jateng@bps.go.id

ISSN 2655-075x



9 772655 075337